

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

**BIRO UMUM SETDA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

**RANCANGAN AKHIR (RANHIR)
RENCANA KERJA (RENJA) 2025**

TAHUN ANGGARAN
2024



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/256/2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 90);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
25. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
 - g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
 - j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;

- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- jj. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- kk. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
- ll. Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- mm. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- nn. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- oo. Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- pp. Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- qq. Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- rr. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- ss. Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Setda Kalimantan Tengah;
- tt. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- uu. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.

- KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang telah ditetapkan, menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Juli 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri:
Up. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
Up. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
c. Asisten Administrasi Umum; dan
d. Kepala Biro Hukum.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
5. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk diketahui.

KATA PENGANTAR

Pembangunan daerah yang sinergi dan komprehensif, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, partisipatif, berdaya saing dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks oleh sebab itu Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu menyusun Rancangan Akhir (RANHIR) Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Periode Tahun 2021 - 2026.

Rancangan Akhir (RANHIR) Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan kapasitas Biro Umum selaku unit kerja serta menjalankan tugas dan fungsinya guna mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Rancangan Akhir (RANHIR) Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Tahun 2025 ini diharapkan dapat digunakan sebagai komitmen bersama bagi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, serta kerangka berpikir dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas perencanaan Rancangan Akhir (RANHIR) Rencana Kerja (RENJA), sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan mampu untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada guna kemajuan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dimasa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa Rancangan Akhir (RANHIR) Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah ini masih belum menyentuh semua kepentingan karena berbagai keterbatasan, namun ke depannya akan diupayakan secara lebih baik. Oleh karena itu, saran yang dapat menyempurnakan Rencana Kerja (RENJA) ini sangat diharapkan sebagai umpan balik di masa yang akan datang.

Dengan disusunnya Rancangan Akhir (RANHIR) Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua.

Plt. KEPALA BIRO UMUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



H. SITI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P

Pembina

NIP. 197411302005012008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BIRO UMUM TAHUN 2023	7
2.1. Hasil Evaluasi Renja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.....	13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.....	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	18
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	19
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	19
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.....	20
3.3 Program dan Kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.....	22
BAB IV RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BIRO UMUM	25
4.1 Rancangan Akhir Rencana Kerja.....	25
4.2 Sumber Pendanaan	25
BAB V PENUTUP	26
LAMPIRAN	27

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu perencanaan pembangunan (*development planning*) adalah aspek yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi.

Melihat perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dokumen rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
3. Rencana Pembangunan Tahunan/ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Tujuannya untuk kesinambungan pembangunan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dokumen-dokumen perencanaan tersebut diterjemahkan ke dalam proses penganggaran yang berorientasi pada prestasi kerja (*performance based budgeting*) dalam kerangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta **Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah**, dokumen-dokumen perencanaan tersebut diterjemahkan ke dalam proses penganggaran yang berorientasi pada prestasi kerja (*performance based budgeting*) dalam kerangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, bahwa setiap instansi pemerintah perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD dan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD. Rencana Kerja SKPD tersebut merupakan penjabaran dari Renstra SKPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja SKPD memuat kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sejauh ini Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Rancangan RENSTRA Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 untuk operasional rencana program dan kegiatan tahunan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Renstra Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman

bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistimatis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang pelayanan dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penyusunan RENJA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 memperhatikan beberapa unsur pokok yaitu :

- a. Masalah atau kendala apa saja yang dihadapi dan sumber daya yang bagaimana akan digunakan serta dimana pengalokasiannya;
- b. Tujuan apa saja yang dikehendaki;
- c. Sasaran dan prioritas apa untuk mewujudkannya, serta
- d. Kebijakan apa untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

1.2 Landasan Hukum.

Beberapa produk perundangan yang menjadi dasar acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANHIR RENJA) Biro Umum Setda Povinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
14. Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANHIR RENJA) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 adalah :

- a. Sebagai dasar untuk penyusunan KUA, PPAS, RKA dan DPA-SKPD Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
- b. Untuk meningkatkan kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui penyusunan program dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan, serta
- c. Untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021 – 2026 dapat tercapai.

1.4 Sistematika Penulisan.

Cara Penulisan Rancangan Akhir (RANHIR) Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BIRO UMUM TAHUN 2023.

- 2.1 Hasil Evaluasi Renja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN.

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN.

- 4.1 Program dan Kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
- 4.2 Sumber Pendanaan.

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BIRO UMUM TAHUN 2023

2.1. Hasil Evaluasi Renja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu RENJA Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi terhadap RENJA Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) yaitu :

1. Kebijakan perencanaan program dan kegiatan;
2. Pelaksanaan rencana program dan kegiatan;
3. Hasil rencana program & kegiatan.

Evaluasi kinerja tahun 2023 merupakan tahapan dalam penyusunan dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan RENJA SKPD tahun 2023. Tujuan evaluasi kinerja RENJA Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 adalah untuk mengidentifikasi capaian kinerja program dan kegiatan yang belum terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi entry point dalam penyusunan RENJA tahun 2025. Selain itu, evaluasi kinerja tahun 2023 dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi dan keberlanjutan pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD dan RKPD Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan Belanja sebanyak 1 (satu) Program 10 (sepuluh) Kegiatan dan 46 (empat puluh enam) Sub Kegiatan. Masing-masing program antara lain :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dengan indikator program adalah terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang prima dengan anggaran sebesar **Rp 116.677.214.204,-**. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan yaitu :

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD.
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD.
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD.
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
 - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
 - 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor.
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 2) Pengadaan Mebel.
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 3) Pemeliharaan Mebel.
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 5) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud.
 - 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - 8) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 3) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 4) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

10. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- 1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah.
- 2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.
- 3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2023, untuk mendukung pelaksanaan program/ kegiatan Biro Umum, APBD Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalokasikan Anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni sebesar Rp 119.877.860.442,- anggaran ini dibagi menjadi Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang & Jasa) dan Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan & Mesin dan Belanja Modal Gedung & Bangunan) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 98.369.875.894,- dan Belanja Modal sebesar Rp 21.507.984.548,-. Pagu Murni tersebut dapat dilihat pada DPA Murni Biro Umum Nomor : DPA/A.1/4.01.2.10.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 29 Desember 2023.

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami pergeseran anggaran (DPPA) dengan tidak merubah struktur anggaran yang ada dengan Nomor DPPA : DPPA/A.2/4.01.2.10.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 9 Juni 2023 pergeseran terjadi antar sub kegiatan dan rekening dengan tidak merubah pagu belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Pagu Biro Umum mengalami perubahan dengan Nomor : DPPA/B.1/4.01.2.10.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 8 Oktober 2023. Belanja Operasi sebesar Rp 98.357.171.406,- dan Belanja Modal Rp 18.320.042.798. Selanjutnya Biro Umum melakukan pergeseran setelah perubahan Nomor : DPPA/B.1/4.01.2.10.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 22 November 2023. Belanja Operasi sebesar Rp 98.681.171.406,- Belanja Modal Rp 17.996.042.798,-. Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, realisasi keuangan untuk Belanja Operasi sebesar Biro Umum yaitu sebesar Rp 89.395.648.188,- atau 90,64%. Sedangkan untuk Belanja Modal realisasi keuangan sebesar

Rp 17.715.453.546,- atau sebesar 98,44%. Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan kegiatan sudah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan. Realisasi total Keuangan Biro Umum untuk tahun anggaran 2023 adalah sebesar **Rp 107.111.101.734,-** atau sebesar **91,80%**.

Tabel 2.1 Realisasi Biro Umum 31 Desember 2023

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
		2023	31-Des
1	2	3	4
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	116.677.214.204	107.111.101.734
4.01.4.01.01.08.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.400.000	121.642.300
4.01.4.01.01.08.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	3.538.500
4.01.4.01.01.08.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	4.000.000	3.210.000
4.01.4.01.01.08.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	30.150.000	29.148.000
4.01.4.01.01.08.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	14.000.000	11.293.000
4.01.4.01.01.08.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	30.250.000	26.483.400
4.01.4.01.01.08.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.000.000	23.969.400
4.01.4.01.01.08.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.000.000	24.000.000
4.01.4.01.01.08.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.709.744.145	39.516.505.744
4.01.4.01.01.08.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.467.744.145	39.274.743.291
4.01.4.01.01.08.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	132.000.000	131.863.603
4.01.4.01.01.08.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	49.969.600
4.01.4.01.01.08.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	60.000.000	59.929.250
4.01.4.01.01.08.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	662.215.657	659.796.784
4.01.4.01.01.08.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	9.968.950
4.01.4.01.01.08.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	437.215.657	434.930.134
4.01.4.01.01.08.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	215.000.000	214.897.700
4.01.4.01.01.08.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	99.998.482
4.01.4.01.01.08.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	100.000.000	99.998.482
4.01.4.01.01.08.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.049.407.000	9.331.815.964

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
		2023	31-Des
1	2	3	4
4.01.4.01.01.08.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	750.407.000	746.913.200
4.01.4.01.01.08.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	435.000.000	432.740.297
4.01.4.01.01.08.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	334.000.000	333.735.000
4.01.4.01.01.08.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.685.000.000	3.674.332.065
4.01.4.01.01.08.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.730.000.000	4.029.388.702
4.01.4.01.01.08.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	115.000.000	114.706.700
4.01.4.01.01.08.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.834.246.748	16.537.160.980
4.01.4.01.01.08.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.513.188.498	9.281.592.000
4.01.4.01.01.08.07.05	Pengadaan Mebel	1.788.000.000	1.763.470.380
4.01.4.01.01.08.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.188.000.000	1.174.741.200
4.01.4.01.01.08.07.09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.058.250	44.535.000
4.01.4.01.01.08.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.150.000.000	2.139.098.900
4.01.4.01.01.08.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.150.000.000	2.133.723.500
4.01.4.01.01.08.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.589.533.280	14.459.113.056
4.01.4.01.01.08.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	86.250.000	74.880.650
4.01.4.01.01.08.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4.649.000.000	4.617.631.767
4.01.4.01.01.08.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.445.000.000	1.444.431.863
4.01.4.01.01.08.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.409.283.280	8.322.168.776
4.01.4.01.01.08.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.486.167.374	15.946.213.665
4.01.4.01.01.08.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.000.000.000	774.657.992
4.01.4.01.01.08.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.500.000.000	2.194.801.005
4.01.4.01.01.08.09.05	Pemeliharaan Mebel	110.000.000	109.700.000
4.01.4.01.01.08.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	930.000.000	929.888.350
4.01.4.01.01.08.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	90.000.000	89.486.500
4.01.4.01.01.08.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.466.167.374	9.457.989.318
4.01.4.01.01.08.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.010.000.000	1.009.766.000
4.01.4.01.01.08.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.380.000.000	1.379.924.500

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
		2023	31-Des
1	2	3	4
4.01.4.01.01.08.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.580.000.000	2.412.689.884
4.01.4.01.01.08.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000	235.429.884
4.01.4.01.01.08.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000	197.260.000
4.01.4.01.01.08.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	80.000.000	-
4.01.4.01.01.08.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.000.000.000	1.980.000.000
4.01.4.01.01.08.16	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	8.535.500.000	8.026.164.875
4.01.4.01.01.08.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4.901.500.000	4.649.494.034
4.01.4.01.01.08.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	3.271.000.000	3.014.808.311
4.01.4.01.01.08.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	363.000.000	361.862.530

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada **tabel 2.2** (terlampir).

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian Renstra Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Program yang dilaksanakan sebanyak 1 program.
2. Kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 10 kegiatan.
3. Sub Kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 46 sub kegiatan.
4. Persentase Pelaksanaan Program 91,80%.
5. Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 100%.

Sehingga dapat diambil kesimpulan pelaksanaan kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah berjalan secara efektif dan efisien serta mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah, bahwa Biro Umum merupakan unsur staf yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah c.q. Asisten Administrasi Umum.

Biro Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang tugas biro umum, penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ketatausahaan, kearsipan, melaksanakan urusan rumah tangga, sandi dan telekomunikasi, penatausahaan keuangan, verifikasi dan akuntansi, dan perlengkapan serta koordinasi penyusunan program lingkup Sekretariat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Umum didukung ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, serta pengendalian dan evaluasi serta sinergitas dan koordinasi dengan instansi terkait. Struktur Organisasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah terdiri dari :

- 1. Bagian Tata Usaha**, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan; dan
- 2. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda**, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
 - a) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah;
 - b) Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset; dan
 - c) Sub Bagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah,
- 3. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan**, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga Gubernur;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan
 - c) Sub Bagian Urusan Dalam.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah didukung dan dibantu oleh :

a. Jumlah Pegawai/ Personil.

PNS	Tenaga Kontrak	Jumlah
70	153	223

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.

PNS				Tenaga Kontrak	Jumlah
Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I		
2	37	28	3	153	223

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon.

Eselon II.b	Eselon III.a	Eselon IV.a	Fungsional Umum	Fungsional Tertentu	Jumlah
0	2	8	57	3	70

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.

Pasca Sarjana (S2)	Sarjana (S1)	Sarjana Muda (D-4)	Sarjana Muda (D-3)	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
9	16	5	4	30	3	3	70

e. Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Perjenjangan.

Diklatpim IV	Diklatpim III	Diklatpim II	Jumlah
6	1	0	6

Pencapaian kinerja indikator Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada tujuan dan sasaran target sesuai dengan Renstra yang berdasarkan atas hasil standard kebutuhan pelayanan.

Untuk menganalisa kinerja pelayanan yang menjadi tugas dan fungsi Biro Umum digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra atau berdasarkan atas hasil analisis standard kebutuhan pelayanan.

Pencapaian kinerja indikator Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada tujuan dan sasaran target sesuai dengan Renstra yang berdasarkan atas hasil standard kebutuhan pelayanan.

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja				
		2023				
		Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Realisasi TW IV
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	83%	25%	50%	75%	100%
2.	Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	2,1%	25%	50%	75%	100%
3.	Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	150 Kali	75	134	184	311

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja				
		2023				
		Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Realisasi TW IV
1	2	3	4	5	6	7
4.	Jumlah Pelayanan Jamuan/Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda	125 Kali	22	73	120	170
5.	Jumlah tata naskah dinas yg ditandatangani oleh pimpinan	230 Surat	107	152	251	586
6.	Jumlah Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas/Operasional	85 Kali	46	92	142	175
7.	Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/Aula	165 Kali	73	127	207	257

Adapun pencapaian kinerja pelayanan SKPD seperti **tabel 2.3.** (*lebih lengkap pada lampiran*).

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan, yang ditunjukkan dengan capaian pelaksanaan program dan output yang dihasilkan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka perlu strategi operasional yang dapat diimplementasikan dan diwujudkan melalui kebijaksanaan, rangkaian program, kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan yang menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas sebagai suatu sistem operasional Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan berdasarkan pada Rencana Strategis (RESTRA) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah dirumuskan melalui Renstra Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak terlepas dari Renstra Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun strategi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja dan peran serta fungsi Biro Umum dalam pengelolaan aset Setda.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih transparan dan akuntabel.

- c. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Biro Umum.
- d. Optimalisasi penggunaan anggaran dalam percepatan penyerapan anggaran.
- e. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengembangkan urusan kewenangan yang ada.
- f. Menerapkan reward and punishment dengan standar kriteria kinerja yang pasti.
- g. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan pengendalian anggaran.
- h. Mewujudkan ketersediaan data/ informasi yang akurat (database) sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.

Pada Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 telah dilakukan review mengenai kebutuhan, dan setelah dilakukan review memang ada keterkaitan dengan alokasi kebutuhan dana masing-masing kegiatan. Penyesuaian terhadap alokasi dana tersebut telah melalui proses sesuai perkembangan yang terjadi pada masa yang akan datang, sehingga diharapkan program dan kegiatan yang telah disusun dapat tercapai sesuai target.

Pada Rancangan Akhir RKPD ini tidak banyak terjadi perubahan-perubahan baik dari sisi program/ kegiatan maupun lokasi, melainkan hanya ada pengurangan/ penyesuaian anggaran sesuai PPAS yang telah disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini juga telah melalui proses penyesuaian dengan kebutuhan anggaran sehingga perubahan atas apa yang telah ditargetkan dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Pada bagian ini dapat kami review Rancangan Akhir RKPD Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana terlihat pada **tabel 2.4 (terlampir)**.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang tugas Biro Umum, penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ketatausahaan, kearsipan, melaksanakan urusan rumah tangga, sandi dan telekomunikasi, penatausahaan keuangan, verifikasi dan pelaporan keuangan, dan perlengkapan dan aset setda serta koordinasi penyusunan program lingkup Sekretariat Daerah.

Sehingga sesuai dengan kewenangannya, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penelaahan dan kompilasi terhadap usulan program dan kegiatan dari masing masing Bagian yang ada di Biro Umum dan melalui mekanisme analisa kebutuhan barang dan jasa yang didapat dari usulan Biro-Biro di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bahan dan acuan dalam penentuan prioritas penyusunan Rencana Kerja.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sehingga pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang tugas biro umum, penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ketatausahaan,

kearsipan, melaksanakan urusan rumah tangga, penatausahaan keuangan, verifikasi dan pelaporan keuangan, perlengkapan dan aset setda serta koordinasi penyusunan program lingkup Sekretariat Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

3.2.1. Tujuan.

Sesuai Renstra Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang profesional.
- b. Terjaminnya kepemilikan barang milik daerah melalui inventarisasi aset secara berkala.
- c. Terjaminnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang prima.

Tujuan tersebut di atas adalah sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah selaku unit kerja SKPD diharapkan mampu menjalankan tupoksinya.

3.2.2. Sasaran.

Sasaran yang akan dicapai dari tahun ke tahun selama masa 5 (lima) tahun jangka waktu rencana strategis Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, yakni sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, terdiri dari :
 1. Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik;
 2. Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pimpinan yang Inovatif dan Responsif yang terdiri dari :
 1. Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
 2. Jumlah Pelayanan Jamuan/ Audiensi dan Penerima Tamu Pemda.
 3. Jumlah Naskah Dinas yang ditindaklanjuti oleh Pimpinan;

4. Jumlah Pelayanan penggunaan kendaraan dinas/ operasional;

5. Jumlah Pelayanan Ruang Rapat/ Aula.

Kaitan antara tujuan, sasaran dengan indikator capaiannya dapat terlihat pada **tabel 3.1** (terlampir).

TABEL 3.1 RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	Jumlah sarana dan prasarana yang berkualitas baik (A) dibagi total sarana dan prasarana yang tercatat (B) dikalikan 100% $A/B \times 100\% =$ persentase capaian kinerja	Data Aset Sarana dan Prasarana Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
		Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang baru (A) dibagi total sarana dan prasarana yang tercatat (B) dikalikan 100% $A/B \times 100\% =$ persentase capaian kinerja	Data Aset Sarana dan Prasarana Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif	Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
		Pelayanan Jamuan/ Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda	Jumlah Pelayanan Jamuan/ Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda	Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
		Naskah Dinas yang ditindaklanjuti pimpinan	Jumlah Naskah Dinas yang ditindaklanjuti pimpinan	Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
		Pelayanan penggunaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Pelayanan penggunaan kendaraan dinas/ operasional	Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
		Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/ Aula	Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/ Aula	Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

**TABEL 3.2 TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TA. 2025**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	Persen	91%
		Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	Persen	2,5%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif	Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	Kali	160 Kali
		Pelayanan Jamuan/ Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda	Kali	160 Kali
		Naskah Dinas yang ditindaklanjuti pimpinan	Kali	250 Surat
		Pelayanan penggunaan kendaraan dinas/ operasional	Kali	90 Kali
		Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/ Aula	Kali	170 Kali

3.3 Program dan Kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Pada Tahun 2021, setiap SKPD diwajibkan untuk menyesuaikan dan melakukan pemutakhiran program dan kegiatan yang semula berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang menjadi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klarifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dari Pemutakhiran tersebut, *Biro Umum memiliki 1 Program, 10 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan* berdasarkan Renstra Tahun 2021 sampai dengan 2026 dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

A. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

E. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
2. Pengadaan Mebel.
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
4. Pengadaan Aset Tetap Lainnya.
5. Pengadaan Aset Tak Berwujud.
6. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
3. Pemeliharaan Mebel.
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
5. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
6. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud.
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

I. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

J. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah.
2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.
3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.

BAB IV

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BIRO UMUM

4.1 Rancangan Akhir Rencana Kerja

Ranhir Renja menerjemahkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2025 Biro Umum disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klarifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026 yang telah dibuat pada awal tahun 2021 lalu. (data terlampir)

4.2 Sumber Pendanaan

Untuk mendukung berbagai program tersebut di atas, masukan yang digunakan adalah antara lain sumber daya manusia yang dimiliki Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, teknologi serta sumber pendanaan yang digunakan diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB V

P E N U T U P

Rancangan Akhir Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke-4 Rencana Strategis (RESTRAS) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026.

Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 menjadi dasar untuk penetapan KUA-PPAS, RKA, dan DPA-SKPD tahun anggaran 2025 sebagai manifestasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Biro Umum tahun 2025 ini juga sebagai bahan acuan pertanggungjawaban Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2025.

Demikian Rancangan Renja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini disusun dan dibuat, semoga dokumen ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. KEPALA BIRO UMUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



H. SITI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P

Pembina

NIP. 197411302005012008

LAMPIRAN

Tabel-tabel Keterangan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) terlampir.

Laporan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Keadaan s/d TW IV 2023

Nama Perangkat Daerah : Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah sesuai RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 **) :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif
- 3.
- 4.

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu/Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan/ Tahun 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja p								
					6		7		8		9		10						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	04.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah			624.377.530.751			218.809.954.768			120.759.128.250			12.130.576.379			29.320.131.424	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif	4.01.4.01.01.08.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.047.981.824			234.735.000			187.500.000			0			6.748.500	
		4.01.4.01.01.08.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renja, Renja Perubahan Biro Umum (dokumen)	16	dokumen	141.250.000	6	Dokumen	24.800.000	6	Dokumen	25.000.000	3	dokumen	0	3	dokumen	3.538.500
		4.01.4.01.01.08.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	dokumen	147.750.000	2	Dokumen	31.099.000	2	Dokumen	25.000.000	1	dokumen	0	1	dokumen	3.210.000
		4.01.4.01.01.08.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	20	dokumen	163.750.000	8	Dokumen	24.755.000	8	Dokumen	31.250.000	4	dokumen	0	4	dokumen	0
		4.01.4.01.01.08.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)	5	dokumen	141.250.000	2	Dokumen	24.738.000	2	Dokumen	25.000.000	1	dokumen	0	1	dokumen	0
		4.01.4.01.01.08.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	20	dokumen	170.250.000	8	Dokumen	30.539.500	8	Dokumen	31.250.000	4	dokumen	0	4	dokumen	0
		4.01.4.01.01.08.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Triwulan Capaian Kinerja, Laporan TEPRA, LPPD dan LKPJ	20	laporan	141.250.000	8	Laporan	72.741.500,00	8	Laporan	25.000.000	4	laporan	0	4	laporan	0
		4.01.4.01.01.08.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Perangkat Daerah (LKIP)	15	laporan	142.481.824	6	Laporan	26.062.000	6	Laporan	25.000.000	3	laporan	0	3	laporan	0
		4.01.4.01.01.08.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			289.598.839.118			81.377.421.839			50.535.971.250			7.573.872.513			14.581.810.909
		4.01.4.01.01.08.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan PNS Lingkup Setda	5	Tahun	288.315.339.118	2	Tahun	81.168.134.979	2	Tahun	50.273.971.250	1	Tahun	7.519.786.913	1	Tahun	14.548.567.606
		4.01.4.01.01.08.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Tahun	634.000.000	2	Tahun	102.189.610	2	Tahun	127.000.000	1	Tahun	36.146.800	1	Tahun	33.243.303
		4.01.4.01.01.08.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan Akhir Tahun Biro Umum dan Setda	10	laporan	337.500.000	4	Laporan	50.429.750	4	Laporan	70.000.000	2	laporan	8.704.200	2	laporan	0
		4.01.4.01.01.08.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan semesteran Biro Umum dan Setda Prov. Kalteng	5	laporan	312.000.000	2	Laporan	56.667.500,00	2	Laporan	65.000.000	1	laporan	9.234.600	1	laporan	0
		4.01.4.01.01.08.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.003.260.000			998.876.903			760.000.000			4.499.150			0
		4.01.4.01.01.08.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	10	dokumen	72.250.000	4	Dokumen	14.937.250	4	Dokumen	10.000.000	2	dokumen	1.353.150	2	dokumen	0
		4.01.4.01.01.08.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terjaminnya kepemilikan Aset berupa Rujab Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Gedung Kantor Gubernur serta kendaraan dinas operasional	5	laporan	2.565.000.000	2	Laporan	584.494.453,00	2	Laporan	500.000.000	1	laporan	0	1	laporan	0

- Nama Perangkat Daerah : Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
 Sasaran Pembangunan Jangka Menengah sesuai RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 **) :
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif
 - 3.
 - 4.

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu/Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan/ Tahun 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja p								
					6		7		8		9		10						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		4.01.4.01.01.08.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah serta penyusunan KIB KIR dan Buku Inventaris Lingkup Setda	10	laporan	1.366.010.000	4	Laporan	399.445.200	4	Laporan	250.000.000	2	laporan	3.146.000	2	laporan	0
		4.01.4.01.01.08.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Telaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.805.838.176			24.023.670			1.132.000.000			0			0
		4.01.4.01.01.08.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN Sekretariat Daerah (stell)	7170	Stell	3.650.000.000	2340	Stell	0	2340	Stell	900.000.000	2000	Stell	0	2000	Stell	0
		4.01.4.01.01.08.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Terfasilitasinya Peningkatan kompetensi PNS dan Tenaga Kontrak melalui mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek Dan Kursus Singkat	145	orang	1.155.838.176	40	Orang	24.023.670	40	Orang	232.000.000	20	orang	0	20	orang	0
		4.01.4.01.01.08.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Telaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			42.364.758.500			18.521.215.499			7.554.407.000			749.365.548			2.110.670.570
		4.01.4.01.01.08.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik, lampu pijar dan battery kering lingkup setda prov.kalteng	5	Tahun	3.868.814.000	2	Tahun	1.312.015.123,00	2	Tahun	784.407.000	1	Tahun	1.779.600	1	Tahun	183.021.000
		4.01.4.01.01.08.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Lingkup Biro Umum dan Pimpinan (Sekda, Asisten, SAG)	5	Tahun	2.594.540.000	2	Tahun	899.727.272	2	Tahun	450.000.000	1	Tahun	98.545.800	1	Tahun	102.308.700
		4.01.4.01.01.08.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan, blanko-blanko administrasi perkantoran dan penggandaan keperluan Pimpinan dan Biro Umum Setda Prov.Kalteng (tahun)	5	Tahun	2.141.404.500	2	Tahun	669.874.500	2	Tahun	420.000.000	1	Tahun	25.750.000	1	Tahun	140.245.000
		4.01.4.01.01.08.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya pelayanan dan jamuan (makanan dan minuman Tamu) kunjungan tamu-tamu Pejabat Negara/Departemv/Lembaga Pemerintah Non Departemv/Luar Negeri serta makan minum rapat SKPD (tahun)	5	Tahun	15.035.000.000	2	Tahun	8.903.476.639	2	Tahun	2.300.000.000	1	Tahun	472.177.260	1	Tahun	749.965.255
		4.01.4.01.01.08.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah ASN Lingkup Biro Umum dan Pimpinan (Sekda, Asisten dan SAG) (tahun)	5	Tahun	17.990.000.000	2	Tahun	6.396.141.665	2	Tahun	3.500.000.000	1	Tahun	151.112.888	1	Tahun	927.358.615
		4.01.4.01.01.08.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terkelolanya Arsip Biro umum (Pengarsipan)	10	laporan	735.000.000	4	Laporan	339.980.300,00	4	Laporan	100.000.000	2	laporan	0	2	laporan	7.772.000
		4.01.4.01.01.08.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			74.406.513.457			32.948.476.974			19.688.000.000			0			2.520.177.200
		4.01.4.01.01.08.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terperuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kendaraan)	-	4	Unit	0	4	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.01.4.01.01.08.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terperuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kendaraan)		14	Unit	22.888.782.323	14	Unit	2.100.000.000	3	unit	0	3	unit	930.992.000		
		4.01.4.01.01.08.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel ruang kerja (Furniture) KDH WKDH, ASN Lingkup Biro Umum dan Pimpinan (Paket)	5	Tahun	9.041.000.000	2	Tahun	2.153.184.500,00	2	Tahun	1.738.000.000	1	Tahun	0	1	Tahun	287.127.500

Nama Perangkat Daerah : Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah sesuai RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 **):

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif
- 3.
- 4.

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu/Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan/ Tahun 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja p								
					6		7		8		9		10						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		4.01.4.01.01.08.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya utk Kantor dan Rujab Pimpinan (pengadaan LCD Proyektor dan Sound System utk AEH, videotron dan Sound System untuk AJT It.1 dan peralatan mesin lainnya) (paket)	5	Tahun	3.200.000.000	2	Tahun	0	2	Tahun	1.000.000.000	1	Tahun	0	1	Tahun	795.857.700
		4.01.4.01.01.08.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangunya Gedung atau Bangunan Lainnya (Gedung Genset, Food Court dan ATM Center, serta penataan Ruang Terbuka Hijau di Area Kantor Gubernur) di Lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Gedung/bangunan/area)	1	Gedung	24.200.000.000	-	-	0	-	-	10.100.000.000	1	Gedung	0	1	Gedung	0
		4.01.4.01.01.08.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Penangkal Petir Gedung/bangunan, Public Information Service, Alat Pendeteksi Kebakaran) (Fasilitas/Unit)	1	Fasilitas	4.800.000.000	2	Fasilitas	0	2	Fasilitas	2.000.000.000	1	Fasilitas	0	1	Fasilitas	158.900.000
		4.01.4.01.01.08.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan yang memadai dan mendukung kinerja aparatur Lingkup Setda dan Rujab Pimpinan (Paket)	5	Tahun	8.765.513.457	2	Tahun	7.906.510.151,00	2	Tahun	2.750.000.000	1	Tahun	0	1	Tahun	347.300.000
		4.01.4.01.01.08.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80.498.832.000			27.481.505.365			15.391.250.000			2.173.271.808			3.648.966.266
		4.01.4.01.01.08.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman surat/paket/barang (Surat)	6500	Surat	408.375.000	2000	Surat	58.176.750	2000	Surat	86.250.000	1000	surat	0	1000	surat	6.112.500
		4.01.4.01.01.08.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terjaminnya pasokan listrik, air bersih, telepon dan internet di lingkungan Rujab dan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (tahun)	5	Tahun	26.137.081.864	2	Tahun	8.441.622.878	2	Tahun	5.000.000.000	1	Tahun	1.016.486.988	1	Tahun	1.243.757.271
		4.01.4.01.01.08.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor (tahun)	5	Tahun	4.861.050.000	2	Tahun	4.095.235.550	2	Tahun	905.000.000	1	Tahun	107.489.400	1	Tahun	357.485.963
		4.01.4.01.01.08.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya pelayanan umum kantor (Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak, Administrasi Keuangan, serta Jasa dan Alat Kebersihan Kantor) (tahun)	5	Tahun	49.092.325.136	2	Tahun	14.886.470.187	2	Tahun	9.400.000.000	1	Tahun	1.049.295.420	1	Tahun	2.041.610.532
		4.01.4.01.01.08.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			72.566.950.000			38.490.284.770			14.880.000.000			437.277.361			3.731.467.715
		4.01.4.01.01.08.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terjaminnya pasokan BBM/ pelumas serta pemeliharaan mobil jabatan KDH dan WKDH (Unit)	5	Tahun	5.050.000.000	2	Tahun	1.200.002.996,00	2	Tahun	1.000.000.000	1	Tahun	62.741.125	1	Tahun	173.836.798
		4.01.4.01.01.08.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan dinas meliputi pasokan BBM/ pelumas dan pemeliharaan serta pembayaran STNK (tahunan dan 5 tahunan) dan KIR kendaraan dinas/operasional (Unit)	Terjaminnya pelayanan operasional kendaraan dinas meliputi pasokan BBM/ pelumas dan pemeliharaan serta pembayaran STNK (tahunan dan 5 tahunan) dan KIR kendaraan dinas/operasional (Unit)	5	Tahun	11.986.950.000	2	Tahun	3.433.596.511	2	Tahun	2.500.000.000	1	Tahun	231.638.536	1	Tahun	670.758.667

Nama Perangkat Daerah : Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
 Sasaran Pembangunan Jangka Menengah sesuai RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 **) :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif
- 3.
- 4.

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu/Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan/ Tahun 2023 (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja p								
					6		7		8		9		10						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		4.01.4.01.01.08.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel di lingkungan Setda dan Rujab	5	Tahun	1.920.000.000	2	Tahun	99.960.500	2	Tahun	500.000.000	1	Tahun	0	1	Tahun	0
		4.01.4.01.01.08.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya di lingkungan Setda dan Rujab	5	Tahun	5.924.070.000	2	Tahun	1.533.753.700	2	Tahun	1.000.000.000	1	Tahun	13.711.000	1	Tahun	60.427.300
		4.01.4.01.01.08.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya di lingkungan Setda dan Rujab	5	Tahun	200.000.000	2	Tahun	195.578.000	2	Tahun		1	Tahun	0	1	Tahun	0
		4.01.4.01.01.08.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terpeliharanya Aset Tak Berwujud di lingkungan Setda dan Rujab	5	Tahun	420.000.000	2	Tahun	62.265.850	2	Tahun	80.000.000	1	Tahun	0	1	Tahun	0
		4.01.4.01.01.08.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Lingkup Rumah Jabatan (tahun)	5	Tahun	39.020.000.000	2	Tahun	28.510.511.693,00	2	Tahun	7.750.000.000	1	Tahun	95.701.700	1	Tahun	2.544.283.950
		4.01.4.01.01.08.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Lingkup Rumah Jabatan (Pemeliharaan Hydran lingkup Setda, Pemeliharaan PIS/pubic information service, pemeliharaan alat deteksi kebakaran dan penangkal petir) (tahun)	4	Tahun	2.000.000.000	0	-	0	0	-	1.050.000.000	1	Tahun	0	1	Tahun	118.113.000
		4.01.4.01.01.08.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Tahun)	5	Tahun	6.045.930.000	2	Tahun	3.454.615.520,00	2	Tahun	1.000.000.000	1	Tahun	33.485.000	1	Tahun	164.048.000
		4.01.4.01.01.08.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			15.959.557.676			2.738.755.684			2.880.000.000			445.528.721			695.686.628
		4.01.4.01.01.08.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	5	Tahun	1.798.012.500	2	Tahun	234.671.184	2	Tahun	300.000.000	1	Tahun	50.528.721	1	Tahun	100.686.628
		4.01.4.01.01.08.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Pakaian Dinas Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Stel)	82	Stell	1.019.795.176	20	Stell	524.084.500,00	20	Stell	200.000.000	16	Stell	0	16	Stell	0
		4.01.4.01.01.08.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5	Tahun	955.000.000	2	Tahun	0	2	Tahun	180.000.000	1	Tahun	0	1	Tahun	0
		4.01.4.01.01.08.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5	Tahun	12.186.750.000	2	Tahun	1.980.000.000	2	Tahun	2.200.000.000	1	Tahun	395.000.000	1	Tahun	595.000.000
		4.01.4.01.01.08.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			39.125.000.000			15.994.659.064			7.750.000.000			746.761.278			2.024.603.636
		4.01.4.01.01.08.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terjaminnya pelayanan urusan kerumahtanggaan KDH (Gubernur) (tahun)	5	Tahun	21.800.000.000	2	Tahun	10.098.096.626	2	Tahun	4.500.000.000	1	Tahun	267.846.992	1	Tahun	1.380.817.600
		4.01.4.01.01.08.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terjaminnya pelayanan urusan kerumahtanggaan WKDH (Wakil Gubernur) (tahun)	5	Tahun	15.450.000.000	2	Tahun	5.219.003.338	2	Tahun	2.900.000.000	1	Tahun	423.864.286	1	Tahun	621.886.036
		4.01.4.01.01.08.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terjaminnya pelayanan urusan kerumahtanggaan Sekretaris Daerah (tahun)	5	Tahun	1.875.000.000	2	Tahun	677.559.100	2	Tahun	350.000.000	1	Tahun	55.050.000	1	Tahun	21.900.000

Laporan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Keadaan s/d TW IV 2023

Nama Perangkat Daerah : Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
Sasaran Pembangunan Jangka Menengah sesuai RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 **) :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif
- 3.
- 4.

FORMULIR (5)

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	ada Triwulan (tahun 2023)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	04.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah			32.392.418.473			33.267.975.458			107.111.101.734			325.921.056.502			0,52	BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif	4.01.4.01.01.08.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0			114.893.800			121.642.300			356.377.300			0,34		
		4.01.4.01.01.08.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renja, Renja Perubahan Biro Umum (dokumen)	3	dokumen	0	3	dokumen	0	12	dokumen	3.538.500	18	dokumen	28.338.500	1,13	dokumen	0,20	
		4.01.4.01.01.08.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	dokumen	0	1	dokumen	0	4	dokumen	3.210.000	6	dokumen	34.309.000	1,20	dokumen	0,23	
		4.01.4.01.01.08.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4	dokumen	0	4	dokumen	29.148.000	16	dokumen	29.148.000	24	dokumen	53.903.000	1,20	dokumen	0,33	
		4.01.4.01.01.08.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)	1	dokumen	0	1	dokumen	11.293.000	4	dokumen	11.293.000	6	dokumen	36.031.000	1,20	dokumen	0,26	
		4.01.4.01.01.08.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4	dokumen	0	4	dokumen	26.483.400	16	dokumen	26.483.400	24	dokumen	57.022.900	1,20	dokumen	0,33	
		4.01.4.01.01.08.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Triwulan Capaian Kinerja, Laporan TEPRA, LPPD dan LKPJ	4	laporan	0	4	laporan	23.969.400	16	laporan	23.969.400	24	laporan	96.710.900	1,20	laporan	0,68	
		4.01.4.01.01.08.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Perangkat Daerah (LKIP)	3	laporan	0	3	laporan	24.000.000	12	laporan	24.000.000	18	laporan	50.062.000	1,20	laporan	0,35	
		4.01.4.01.01.08.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.762.565.066			8.598.257.256			39.516.505.744			120.893.927.583			0,42		
		4.01.4.01.01.08.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan PNS Lingkup Setda	1	Tahun	8.693.315.366	1	Tahun	8.513.073.406	4	Tahun	39.274.743.291	6	Tahun	120.442.878.270	1,20	Tahun	0,42	
		4.01.4.01.01.08.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Tahun	33.031.000	1	Tahun	29.442.500	4	Tahun	131.863.603	6	Tahun	234.053.213	1,20	Tahun	0,37	
		4.01.4.01.01.08.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan Akhir Tahun Biro Umum dan Setda	2	laporan	16.837.100	2	laporan	24.428.300	8	laporan	49.969.600	12	laporan	100.399.350	1,20	laporan	0,30	
		4.01.4.01.01.08.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan semesteran Biro Umum dan Setda Prov. Kalteng	1	laporan	19.381.600	1	laporan	31.313.050	4	laporan	59.929.250	6	laporan	116.596.750	1,20	laporan	0,37	
		4.01.4.01.01.08.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		369.050.204			286.247.430			659.796.784			1.658.673.687			0,41		
		4.01.4.01.01.08.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	dokumen	2.929.300	2	dokumen	5.686.500	8	dokumen	9.968.950	12	dokumen	24.906.200	1,20	dokumen	0,34	
		4.01.4.01.01.08.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terjaminnya kepemilikan Aset berupa Rujab Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Gedung Kantor Gubernur serta kendaraan dinas operasional	1	laporan	355.080.554	1	laporan	79.849.580	4	laporan	434.930.134	6	laporan	1.019.424.587	1,20	laporan	0,40	

Nama Perangkat Daerah : Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
 Sasaran Pembangunan Jangka Menengah sesuai RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 **) :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif
- 3.
- 4.

FORMULIR (5)

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	ada Triwulan (tahun 2023)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun berjalan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RPKD Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					III		IV		13		14 = 7+13		15 = 14 / 6 x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	11	12	13	14 = 7+13	15 = 14 / 6 x100%	16					
		4.01.4.01.01.08.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah serta penyusunan KIB KIR dan Buku Inventaris Lingkup Setda	2 laporan	11.040.350	2 laporan	200.711.350	8 laporan	214.897.700	12 laporan	614.342.900	1,20	laporan	0,45
		4.01.4.01.01.08.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Telaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		43.424.904		56.573.578	0	99.998.482	0	124.022.152			0,03
		4.01.4.01.01.08.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN Sekretariat Daerah (stell)	2000 Stell	0	2000 Stell	0	8000 Stell	0	10340 Stell	0	1,44	Stell	0,00
		4.01.4.01.01.08.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Terfasilitasinya Peningkatan kompetensi PNS dan Tenaga Kontrak melalui mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek Dan Kursus Singkat	20 orang	43.424.904	20 orang	56.573.578	80 orang	99.998.482	120 orang	124.022.152	0,83	orang	0,11
		4.01.4.01.01.08.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Telaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.673.906.954		3.797.872.892		9.331.815.964		27.853.031.463			0,66
		4.01.4.01.01.08.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik, lampu pijar dan battery kering lingkup setda prov.kalteng	1 Tahun	365.782.000	1 Tahun	196.330.600	4 Tahun	746.913.200	6 Tahun	2.058.928.323	1,20	Tahun	0,53
		4.01.4.01.01.08.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Lingkup Biro Umum dan Pimpinan (Sekda, Asisten, SAG)	1 Tahun	0	1 Tahun	231.885.797	4 Tahun	432.740.297	6 Tahun	1.332.467.569	1,20	Tahun	0,51
		4.01.4.01.01.08.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan, blanko-blanko administrasi perkantoran dan penggandaan keperluan Pimpinan dan Biro Umum Setda Prov.Kalteng (tahun)	1 Tahun	83.250.000	1 Tahun	84.490.000	4 Tahun	333.735.000	6 Tahun	1.003.609.500	1,20	Tahun	0,47
		4.01.4.01.01.08.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya pelayanan dan jamuan (makanan dan minuman Tamu) kunjungan tamu-tamu Pejabat Negara/Departemv/Lembaga Pemerintah Non Departemv/Luar Negeri serta makan minum rapat SKPD (tahun)	1 Tahun	1.304.921.630	1 Tahun	1.147.267.920	4 Tahun	3.674.332.065	6 Tahun	12.577.808.704	1,20	Tahun	0,84
		4.01.4.01.01.08.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah ASN Lingkup Biro Umum dan Pimpinan (Sekda, Asisten dan SAG) (tahun)	1 Tahun	911.008.624	1 Tahun	2.039.908.575	4 Tahun	4.029.388.702	6 Tahun	10.425.530.367	1,20	Tahun	0,58
		4.01.4.01.01.08.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terkelolanya Arsip Biro umum (Pengarsipan)	2 laporan	8.944.700	2 laporan	97.990.000	8 laporan	114.706.700	12 laporan	454.687.000	1,20	laporan	0,62
		4.01.4.01.01.08.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		10.392.389.680		3.624.594.100	0	16.537.160.980		49.485.637.954			0,67
		4.01.4.01.01.08.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terperuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kendaraan)	0	0	0	0	0	0	4	0	#DIV/0!		#VALUE!
		4.01.4.01.01.08.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terperuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kendaraan)	3 unit	7.146.800.000	3 unit	1.203.800.000	12 unit	9.281.592.000	26 unit	32.170.374.323	#DIV/0!	unit	1,32
		4.01.4.01.01.08.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel ruang kerja (Furniture) KDH WKDH, ASN Lingkup Biro Umum dan Pimpinan (Paket)	1 Tahun	826.603.180	1 Tahun	649.739.700	4 Tahun	1.763.470.380	6 Tahun	3.916.654.880	1,20	Tahun	0,43

Nama Perangkat Daerah : Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
 Sasaran Pembangunan Jangka Menengah sesuai RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 **):

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif
- 3.
- 4.

FORMULIR (5)

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	ada Triwulan (tahun 2023)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun berjalan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPd Tahun 2023 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14 / 6 x 100%	16						
		4.01.4.01.01.08.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya utk Kantor dan Rujab Pimpinan (pengadaan LCD Proyektor dan Sound System utk AEH, videotron dan Sound System untuk AJT It.1 dan peralatan mesin lainnya) (paket)	1 Tahun	228.763.000	1 Tahun	150.120.500	4 Tahun	1.174.741.200	6 Tahun	1.174.741.200	1,20	Tahun	0,37	
		4.01.4.01.01.08.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangunya Gedung atau Bangunan Lainnya (Gedung Genset, Food Court dan ATM Center, serta penataan Ruang Terbuka Hijau di Area Kantor Gubernur) di Lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Gedung/bangunan/area)	1 Gedung	1.500.000	1 Gedung	43.035.000	4 Gedung	44.535.000	4 Gedung	44.535.000	4,00	Gedung	0,00	
		4.01.4.01.01.08.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Penangkal Petir Gedung/bangunan, Public Information Service, Alat Pendeteksi Kebakaran) (Fasilitas/Unit)	1 Fasilitas	742.450.000	1 Fasilitas	1.237.748.900	4 Fasilitas	2.139.098.900	6 Fasilitas	2.139.098.900	6,00	Fasilitas	0,45	
		4.01.4.01.01.08.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan yang memadai dan mendukung kinerja aparatur Lingkup Setda dan Rujab Pimpinan (Paket)	1 Tahun	1.446.273.500	1 Tahun	340.150.000	4 Tahun	2.133.723.500	6 Tahun	10.040.233.651	1,20	Tahun	1,15	
		4.01.4.01.01.08.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.158.220.198		5.478.654.784		14.459.113.056		41.940.618.421			0,52	
		4.01.4.01.01.08.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman surat/paket/barang (Surat)	1000 surat	16.870.150	1000 surat	51.898.000	4000 surat	74.880.650	6000 surat	133.057.400	0,92	surat	0,33	
		4.01.4.01.01.08.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terjaminnya pasokan listrik, air bersih, telepon dan internet di lingkungan Rujab dan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (tahun)	1 Tahun	1.014.267.338	1 Tahun	1.343.120.170	4 Tahun	4.617.631.767	6 Tahun	13.059.254.645	1,20	Tahun	0,50	
		4.01.4.01.01.08.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor (tahun)	1 Tahun	120.794.500	1 Tahun	858.662.000	4 Tahun	1.444.431.863	6 Tahun	5.539.667.413	1,20	Tahun	1,14	
		4.01.4.01.01.08.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya pelayanan umum kantor (Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak, Administrasi Keuangan, serta Jasa dan Alat Kebersihan Kantor) (tahun)	1 Tahun	2.006.288.210	1 Tahun	3.224.974.614	4 Tahun	8.322.168.776	6 Tahun	23.208.638.963	1,20	Tahun	0,47	
		4.01.4.01.01.08.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.751.994.458		7.025.474.131	0	15.946.213.665	0	54.436.498.435			0,75	
		4.01.4.01.01.08.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terjaminnya pasokan BBM/ pelumas serta pemeliharaan mobil jabatan KDH dan WKDH (Unit)	1 Tahun	199.570.263	1 Tahun	338.509.806	4 Tahun	774.657.992	6 Tahun	1.974.660.988	1,20	Tahun	0,39	
		4.01.4.01.01.08.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan dinas meliputi pasokan BBM/ pelumas dan pemeliharaan serta pembayaran STNK (tahunan dan 5 tahunan) dan KIR kendaraan dinas/operasional (Unit)	Terjaminnya pelayanan operasional kendaraan dinas meliputi pasokan BBM/ pelumas dan pemeliharaan serta pembayaran STNK (tahunan dan 5 tahunan) dan KIR kendaraan dinas/operasional (Unit)	1 Tahun	428.133.720	1 Tahun	864.270.082	4 Tahun	2.194.801.005	6 Tahun	5.628.397.516	1,20	Tahun	0,47	

Nama Perangkat Daerah : Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
 Sasaran Pembangunan Jangka Menengah sesuai RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 **) :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif
- 3.
- 4.

FORMULIR (5)

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	ada Triwulan (tahun 2023)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Provinsi yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun berjalan)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPd Tahun 2023 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp					
1	2	3	4	5	11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%			16				
		4.01.4.01.01.08.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel di lingkungan Setda dan Rujab	1	Tahun	12.000.000	1	Tahun	97.700.000	4	Tahun	109.700.000	6	Tahun	209.660.500	1,20	Tahun	0,11	
		4.01.4.01.01.08.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya di lingkungan Setda dan Rujab	1	Tahun	252.798.950	1	Tahun	602.951.100	4	Tahun	929.888.350	6	Tahun	2.463.642.050	1,20	Tahun	0,42	
		4.01.4.01.01.08.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya di lingkungan Setda dan Rujab	1	Tahun	0	1	Tahun	0	4	Tahun	0	6	Tahun	195.578.000	1,20	Tahun	0,98	
		4.01.4.01.01.08.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terpeliharanya Aset Tak Berwujud di lingkungan Setda dan Rujab	1	Tahun	46.400.000	1	Tahun	43.086.500	4	Tahun	89.486.500	6	Tahun	151.752.350	1,20	Tahun	0,36	
		4.01.4.01.01.08.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Lingkup Rumah Jabatan (tahun)	1	Tahun	3.188.405.025	1	Tahun	3.629.598.643	4	Tahun	9.457.989.318	6	Tahun	37.968.501.011	1,20	Tahun	0,97	
		4.01.4.01.01.08.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Lingkup Rumah Jabatan (Pemeliharaan Hydran lingkup Setda, Pemeliharaan PIS/pubic information service, pemeliharaan alat deteksi kebakaran dan penangkal petir) (tahun)	1	Tahun	335.391.000	1	Tahun	556.262.000	4	Tahun	1.009.766.000	4	Tahun	1.009.766.000	1,00	Tahun	0,50	
		4.01.4.01.01.08.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Tahun)	1	Tahun	289.295.500	1	Tahun	893.096.000	4	Tahun	1.379.924.500	6	Tahun	4.834.540.020	1,20	Tahun	0,80	
		4.01.4.01.01.08.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			545.528.721			725.945.814			2.412.689.884			5.151.445.568			0,32	
		4.01.4.01.01.08.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	Tahun	50.528.721	1	Tahun	33.685.814	4	Tahun	235.429.884	6	Tahun	470.101.068	1,20	Tahun	0,26	
		4.01.4.01.01.08.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Pakaian Dinas Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Stel)	16	Stell	0	16	Stell	197.260.000	64	Stell	197.260.000	84	Stell	721.344.500	1,02	Stell	0,71	
		4.01.4.01.01.08.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	Tahun	0	1	Tahun	0	4	Tahun	0	6	Tahun	0	1,20	Tahun	0,00	
		4.01.4.01.01.08.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	Tahun	495.000.000	1	Tahun	495.000.000	4	Tahun	1.980.000.000	6	Tahun	3.960.000.000	1,20	Tahun	0,32	
		4.01.4.01.01.08.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Terfasilitasinya Kerumahtangaan Sekretariat Daerah			1.695.338.288			3.559.461.673			8.026.164.875			24.020.823.939			0,61	
		4.01.4.01.01.08.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terjaminnya pelayanan urusan kerumahtangaan KDH (Gubernur) (tahun)	1	Tahun	912.659.452	1	Tahun	2.088.169.990	4	Tahun	4.649.494.034	6	Tahun	14.747.590.660	1,20	Tahun	0,68	
		4.01.4.01.01.08.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terjaminnya pelayanan urusan kerumahtangaan WKDH (Wakil Gubernur) (tahun)	1	Tahun	755.678.836	1	Tahun	1.213.379.153	4	Tahun	3.014.808.311	6	Tahun	8.233.811.649	1,20	Tahun	0,53	
		4.01.4.01.01.08.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terjaminnya pelayanan urusan kerumahtangaan Sekretaris Daerah (tahun)	1	Tahun	27.000.000	1	Tahun	257.912.530	4	Tahun	361.862.530	6	Tahun	1.039.421.630	1,20	Tahun	0,55	

**TABEL 2.3 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja																								PD Penanggung Jawab						
			2022					2023					2024					2025					2026										
			Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Realisasi TW IV	Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Realisasi TW IV	Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Realisasi TW IV	Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Realisasi TW IV	Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III		Realisasi TW IV					
1	2	3	4	5					6	7					8	9					10	11					12	13					14
1	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	80%	80%	25%	50%	75%	100%	83%	25%	50%	75%	100%	86%					89%					91%					Biro Umum					
2	Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	2%	2%	25%	50%	50%	100%	2,1%	25%	50%	75%	100%	2,2%					2,3%					2,5%					Biro Umum					
3	Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	146 Kali	150 Kali	20	45	71	105	150 Kali	75	134	184	311	155 kali					155 Kali					160 Kali					Biro Umum					
4	Jumlah Pelayanan Jamuan/ Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda	100 Kali	100 Kali	47	95	149	200	125 Kali	22	73	120	170	135 kali					150 Kali					160 Kali					Biro Umum					
5	Jumlah tata naskah dinas yg ditandatangani oleh pimpinan	198 Surat	215 Surat	510	1044	1590	2168	230 Surat	107	152	251	586	230 Surat					240 Surat					250 Surat					Biro Umum					
6	Jumlah Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas/Operasional	80 Kali	80 Kali	36	74	117	159	85 Kali	46	92	142	175	85 Kali					90 Kali					90 Kali					Biro Umum					
7	Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/Aula	150 Kali	150 Kali	74	159	240	321	165 Kali	73	127	207	257	165 Kali					170 Kali					170 Kali					Biro Umum					

**TABEL 2.3 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja dan Realisasi Kinerja					PD Penanggung Jawab
		2023					
		Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Realisasi TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	83%	25%	50%	75%	100%	Biro Umum
2.	Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	2,1%	25%	50%	75%	100%	Biro Umum
3.	Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	150 Kali	75	134	184	311	Biro Umum
4.	Jumlah Pelayanan Jamuan/Audiensi dan Penerimaan Tamu Penda	125 Kali	22	73	120	170	Biro Umum
5.	Jumlah tata naskah dinas yg ditandatangani oleh pimpinan	230 Surat	107	152	251	586	Biro Umum
6.	Jumlah Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas/Operasional	85 Kali	46	92	142	175	Biro Umum
7.	Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/Aula	165 Kali	73	127	207	257	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	90.562.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			91.000.000,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah			5.150.000.000,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.200.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah			915.000.000,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10.110.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.115.000.000,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						14.770.000.000,00							14.940.000.000,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	1.300.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.100.000.000,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				83 Unit	2.550.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.600.000.000,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.09.0005		Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	450.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			450.000.000,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	1.100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.200.000.000,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.09.0008		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				6 Unit	170.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.000.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.01.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.500.000.000,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	1.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		500.000.000,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	1.200.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000.000,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						4.896.750.000,00			-	-	-		4.008.012.500,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.11.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	396.750.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		456.262.500,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.11.0002		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				5 Paket	500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		210.000.000,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.11.0003		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.11.0004		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/ Bulan	3.500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		3.041.750.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahainggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	8.150.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-	-	8.125.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah					4 Paket	4.300.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-	-	4.400.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					4 Paket	3.250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-	-	3.300.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga					1 Paket	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-	-	425.000.000,00	BIRO UMUM

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO UMUM						142.355.386.131,00							140.099.743.494,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						142.355.386.131,00							140.099.743.494,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						142.355.386.131,00							140.099.743.494,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	142.355.386.131,00						-	140.099.743.494,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	220.000.000,00			-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-	-	231.250.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		31.250.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		31.250.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	35.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		37.500.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		31.250.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	35.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		37.500.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		31.250.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				2 Laporan	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		31.250.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	73.998.073.631,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	81.369.730.994,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				700 Orang/ Bulan	73.716.573.631,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		81.088.230.994,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	130.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		130.000.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	80.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		80.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				3 Laporan	71.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		71.500.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	835.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	849.750.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		17.250.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	520.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		525.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	300.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		307.500.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	250.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	1.715.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		1.450.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				20 Orang	250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		265.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	9.050.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	9.215.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	800.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		825.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	550.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		575.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	475.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		475.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				4 Laporan	3.500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		3.575.000.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Laporan	3.575.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		3.600.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				2 Dokumen	150.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		165.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	15.700.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	3.375.000.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				5 Unit	3.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		0,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				10 Paket	1.750.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		1.775.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				6 Unit	950.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		500.000.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	9.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		0,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				8 Unit	1.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		0,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		1.100.000.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	17.160.562.500,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-	-	16.271.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2 Laporan	90.562.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		91.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	5.100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		5.150.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	910.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		915.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	11.060.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		10.115.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	13.740.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	14.940.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				6 Unit	1.100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		1.100.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				83 Unit	2.550.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		2.600.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				4 Unit	450.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		450.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				6 Unit	1.100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		1.200.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>				4 Unit	90.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		90.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	7.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah	-		7.500.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		500.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				8 Unit	1.200.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		1.500.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	3.451.750.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	4.008.012.500,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang/Bulan	396.750.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		456.262.500,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				1 Paket	210.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		210.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				4 Orang	200.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		300.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang/ Bulan	2.645.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		3.041.750.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	7.950.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-	-	8.125.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>				4 Paket	4.300.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		4.400.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				4 Paket	3.250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		3.300.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i>				2 Paket	400.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	-		425.000.000,00	BIRO UMUM
J U M L A H								142.355.386.131,00							140.099.743.494,00	



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) TAHUN 2021 - 2026



BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2021

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JALAN RTA. MILONO NO. 1 PALANGKA RAYA TELP. 3221538/
3221214/3221365 DAN FAX. 3234153


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya, kami telah dapat menyusun Renstra Perangkat Daerah (PD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026. Renstra ini disusun guna memenuhi kewajiban sebagai salah satu unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, untuk membuat suatu rencana strategis yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Kewajiban untuk membuat Renstra ini juga untuk memenuhi amanah dari Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa setiap Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, serta mendukung Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 – 2026.

Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sesuai dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2026. Renstra ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi setiap Bagian di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan setiap program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Kami menyadari bahwa Renstra ini barangkali masih jauh dari sempurna, namun paling tidak, bagi kami dapat menjadi arahan yang jelas sekaligus pedoman dan dapat dijadikan alat untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan sebuah organisasi. Dengan segala kerendahan hati demi kesempurnaan penyajian Renstra yang akan datang kami mengharap adanya masukan dari semua pihak.

Tak lupa kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dalam menyusun Renstra ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.

KEPALA BIRO UMUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



LISDA ARRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196809011989112005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.3.1 Maksud	10
1.3.2 Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penyusunan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.....	13
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Biro Umum.....	13
2.1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi	13
2.1.2 Struktur Organisasi	14
2.2 Sumber Daya Biro Umum	19
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)	19
2.2.2 Sarana Prasarana.....	20
2.2.3 Anggaran	22
2.3 Kinerja Pelayanan Biro Umum	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Umum.....	26
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Umum	28
3.1.1 Aspek Pelayanan Publik	28

3.1.2	Aspek Sumber Daya Manusia	29
3.1.3	Aspek Sarana dan Prasarana.....	29
3.2	Telaahan Visi, Misi Dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	30
3.3	Telaahan Renstra.....	33
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	33
3.5	Penentuan Isu Isu Strategis	33
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN BIRO UMUM TAHUN 2021-2026.....	35
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	35
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	41
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
BAB VIII	PENUTUP.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Berdasarkan Golongan.....	19
Tabel 2.2	Data Pegawai Berdasarkan Eselon	19
Tabel 2.3	Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	19
Tabel 2.4	Data Pegawai Berdasarkan Diklat Penjenjangan	20
Tabel 2.5	Jumlah Sarana dan Prasarana Biro Umum	20
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.....	23
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah	25
Tabel 3.1	Penjabaran Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2021-2026	30
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	38
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.....	42
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Penyusunan Rancangan RENSTRA SKPD Provinsi.....	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah	18
Gambar 3.1	Penjabaran Misi RPJMD 2021-2026	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, dan antar daerah, serta juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut yakni diwajibkannya bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan dan penetapan Renstra SKPD merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah, selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah, sehingga penyusunan dan penetapan Renstra SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode

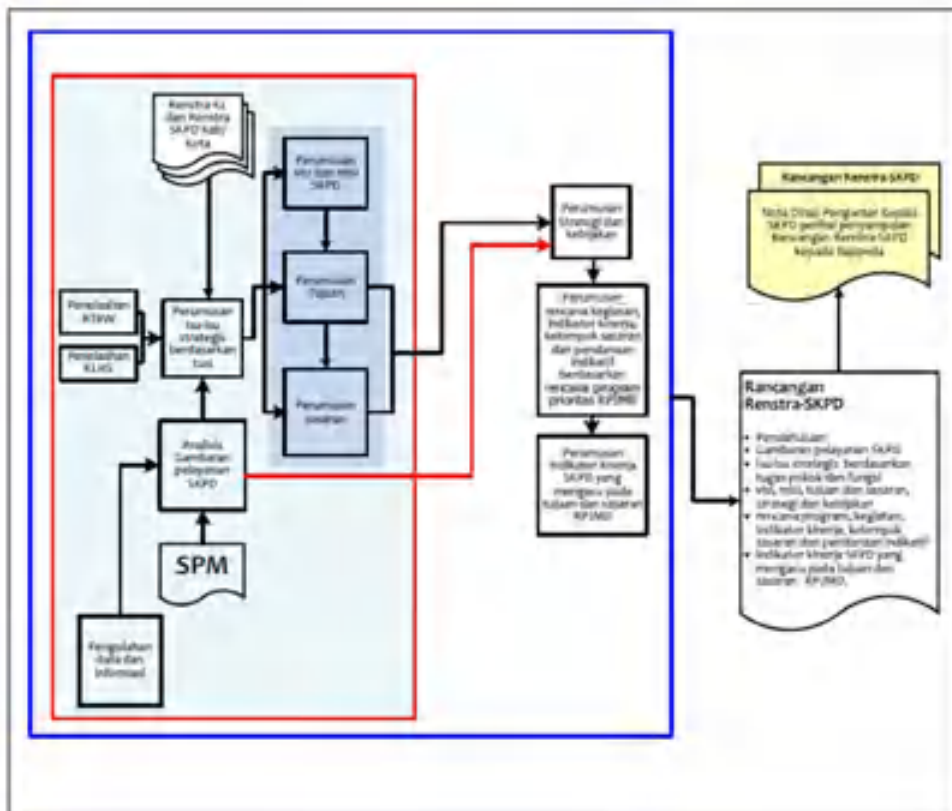
5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan provinsi. Hal ini sesuai dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa setiap Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Renstra SKPD ini mengikuti bagan alur tahapan penyusunan Renstra SKPD yang terdiri dari tiga tahapan yaitu penyusunan rancangan Renstra SKPD, penyusunan rancangan akhir, dan tahap penetapan yang dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1.1

Bagan Alur Penyusunan Rancangan RENSTRA SKPD Provinsi



Terkait dengan kewajiban SKPD dalam penyusunan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD dengan memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta menyelaraskannya dengan renstra kementerian dan lembaga. Dalam hal ini Biro Umum tidak melakukan telaahan terhadap Renstra K/L karena tidak memiliki mitra di tingkat pusat yang mengkoordinasikan program pembangunan nasional.

Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, maka Biro Umum sebagai salah satu unit kerja mandiri di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, berkewajiban untuk menyiapkan Renstra sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikator kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pendukung dan penunjang urusan pemerintahan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Dokumen renstra sebagai bagian dari perencanaan strategis organisasi merupakan pedoman bagi organisasi dalam merumuskan dan menyusun rencana kerja tahunan, rencana kinerja tahunan agar mengikuti arah kebijakan dan strategi guna mencapai tujuan dan sasaran strategis jangka menengah organisasi.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81); dan
 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penerapan perencanaan strategis merupakan wujud ketaatan para penyelenggara negara terhadap keselarasan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Penyusunan Rencana Strategis Biro Umum Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman Biro Umum didalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Umum secara transparan dan akuntabel.

Sebagai pedoman umum yang berlaku secara internal, maka secara substansial rencana strategis ini berisikan arahan makro tentang segala hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran internal dan eksternal organisasi Biro Umum. Oleh karena karena itu agar dapat diimplementasikan secara nyata, selanjutnya harus diterjemahkan secara lebih detail dalam bentuk Rencana Kegiatan Tahunan oleh masing-masing Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan internal Biro Umum Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3.2 Tujuan

Perencanaan strategis memiliki peran penting sebagai *guidance* (panduan) bagi organisasi dalam mencapai tujuannya, sehingga diharapkan terciptanya kesesuaian antara program dan kegiatan yang telah dirumuskan terhadap hasil yang dicapai oleh organisasi. Apabila telah tercipta keselarasan antara tujuan yang ingin dicapai dengan realisasi capaian yang telah diraih, maka hal ini akan berdampak langsung terhadap efektivitas dan efisiensi tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

baik dalam hal perencanaan program/ kegiatan maupun perencanaan penganggarnya. Referensi teoritis menyebutkan bahwa setidaknya terdapat beberapa manfaat dalam penerapan perencanaan strategis (John. M. Bryson, 2000:12) yakni:

- a. Mengembangkan kemampuan berfikir strategis;
- b. Memperjelas arah masa depan;
- c. Melatih kemampuan menciptakan prioritas;
- d. Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan;
- e. Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan;
- f. Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif, dan
- g. Membangun kerja kelompok dan keahlian.

Tujuan penyusunan Renstra Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Menyelaraskan dan mensinkronisasikan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur menunjuk Kalimantan Tengah Makin BERKAH, menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Biro Umum dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2021-2026;
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Biro Umum selama periode tahun 2021-2026;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Biro Umum; serta
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana program pembangunan Biro Umum baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4 Sistematika Penyusunan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BIRO UMUM SETDA KALTENG

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Umum
- 2.2. Sumber Daya Biro Umum
- 2.3. Kinerja Pelayanan Biro Umum
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Umum

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BIRO UMUM

- 3.1. Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Umum
- 3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Biro Umum

2.1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan **Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah**, bahwa Biro Umum merupakan unsur *supporting unit* (unit pendukung) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah c.q. Asisten Administrasi Umum.

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas penyiapan bahan kebijakan pemerintah daerah, bidang tugas Biro Umum penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, penatausahaan keuangan dan aset, verifikasi dan akuntansi, pelaksanaan urusan rumah tangga, serta perlengkapan dan pemeliharaan aset Biro Umum dan Sekretariat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai isi Paragraf 2 Pasal 130 Biro Umum mempunyai fungsi:

- 1) Biro Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha.

- 2) Biro Umum dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
 - b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.
- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
 - b. menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020, susunan organisasi Biro Umum yakni sebagai berikut:

1) Kepala Biro Umum

Kepala Biro mempunyai tugas membina, memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, serta menetapkan program kerja, tata laksana dan mengembangkan semua kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan pimpinan maupun administratif di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha.

2) Kepala Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata Usaha pimpinan dan staf ahli, pengelolaan kendaraan, persuratan dan arsip.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, pengelolaan kendaraan dan persuratan dan arsip;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, pengelolaan kendaraan dan persuratan dan arsip; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:

- a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
- b. Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan; dan
- c. Sub Bagian Persuratan dan Arsip.

3) Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keuangan dan verifikasi Sekretariat Daerah, akuntansi dan penatausahaan aset, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan verifikasi Sekretariat Daerah, akuntansi dan penatausahaan aset, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah;
- b. bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keuangan dan verifikasi Sekretariat Daerah, akuntansi dan penatausahaan aset, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya

Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah;
- b. Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset; dan
- c. Sub Bagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah.

- 4) Bagian Rumah Tangga**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur, urusan dalam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur, urusan dalam;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur, urusan dalam; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Rumah Tangga terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:

- a. Sub Bagian Rumah Tangga Gubernur;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan
- c. Sub Bagian Urusan Dalam.

Struktur organisasi Biro Umum juga dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah



2.2 Sumber Daya Biro Umum

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh 274 personil terdiri dari 106 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 168 orang pegawai honorer/ kontrak. Adapun sumber daya manusia tersebut dapat diklasifikasikan kedalam tingkat golongan, eselon, pendidikan, dan lain-lain. Komposisi pegawai pada Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

PNS				Tenaga Kontrak	Jumlah PNS + Kontrak
Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I		
7	47	47	5	168	
106				168	274

Data : Kepegawaian Biro Umum Tahun 2021

Tabel 2.2
Data Pegawai Berdasarkan Eselon

Eselon II.b	Eselon III.a	Eselon IV.a	Fungsional Umum	Jumlah
1	3	9	93	106

Data : Kepegawaian Biro Umum Tahun 2021

Tabel 2.3
Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Pasca Sarjana (S2)	Sarjana (S1)	Sarjana Muda (D-3)	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
9	35	4	51	5	2	106

Data : Kepegawaian Biro Umum Tahun 2021

Tabel 2.4
Data Pegawai Berdasarkan Diklat Penjurangan

Diklatpim IV	Diklatpim III	Diklatpim II	Jumlah
7	3	2	12

Data : Kepegawaian Biro Umum Tahun 2021

2.2.2 Sarana Prasarana

Guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, di Biro Umum setda Provinsi Kalimantan Tengah telah tersedia peralatan pendukung kerja yang berpengaruh dan mendukung operasional organisasi yang meliputi ruang kerja, ruang rapat, meubelair, laptop ataupun perangkat komputer lengkap (CPU, monitor, printer, keyboard, UPS), alat komunikasi (telepon, faksimili, telex, dan sandi), dan sarana transportasi baik berupa kendaraan dinas pejabat (mobil dan sepeda motor) maupun kendaraan dinas operasional pelayanan (bus, mini bus, pick up, sedan). Berikut merupakan gambaran secara umum sarana dan prasarana Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah:

Tabel 2.5
Jumlah Sarana dan Prasarana Biro Umum

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	Alat-alat Besar	-	-
2	Alat Angkutan	267	Cukup
3	Alat Pertanian	36	Cukup
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.299	Cukup
5	Alat Studio dan Alat Komunikasi	469	Cukup
6	Alat-alat Kedokteran	-	-
7	Alat Laboratorium	3	Cukup
8	Bangunan Gedung	12	Cukup
9	Monumen	2	Cukup
10	Buku Perpustakaan	2	Cukup
11	Barang Bercorak Kebudayaan	15	Cukup

Secara umum kondisi peralatan-peralatan tersebut sudah cukup memadai untuk menunjang kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Walaupun sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup memadai, namun demikian masih perlu penambahan akan kinerja bisa terus ditingkatkan.

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini mengelola Aset/Gedung/Aula Pertemuan/Ruang Rapat yang berkontribusi terhadap penerimaan dan restribusi daerah, diantaranya yaitu:

- a. Restribusi Aula Eka Hapakat (AEH) disewakan untuk ruang rapat/pertemuan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Restribusi Aula Jayang Tingang (AJT) lt.2 disewakan untuk ruang rapat/pertemuan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Restribusi Bangunan Kantin milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada kompleks Sekretariat Daerah RTA. Milono No. 01, Palangka Raya sebanyak 2 kantin yang disewakan perbulanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- d. Pembayaran sewa kantor dan sewa ruang ATM PT. Bank Kalteng di lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Dari data di atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah ditargetkan sebesar Rp.125.000.00,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per tahunnya.

2.2.3 Anggaran

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sumber pembiayaannya berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

2.3 Kinerja Pelayanan Biro Umum

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya. Biro umum sebagai unit pendukung (*supporting unit*) pada Sekretariat Daerah sesuai program prioritas pembangunan yang telah dijabarkan dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Biro Umum melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi umum pemerintahan, antara lain: pelayanan pimpinan, pelayanan kesekretariatan dan beberapa program yang berkaitan dengan **Misi ke-5 yakni Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Profesional, Adil dan Anti Korupsi.**

Tolak ukur keberhasilan pelayanan SKPD perlu ditentukan dengan merumuskan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan SKPD. Biro Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan kinerja SKPD pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

Pencapaian kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya 2016-2021 (tersaji dalam tabel 2.6). Dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat kami simpulkan bahwa tidak terdapat kesenjangan atau gap dari masing-masing indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut ini merupakan gambaran dari Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan dalam Tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase surat yang dapat ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang ditentukan	-	-	-	85%	89%	92%	95%	250	118,58%	109,03%	95,80%	84,14%	145	139,51	122,51	104,13	88,57	58%
2.	Persentase Surat Perintah Membayar (SPM) yang dapat diselesaikan dalam 3 hari kerja	-	-	-	87%	92%	95%	95%	313	119,80%	164,60%	140%	122,40%	163	137,70	178,91	147,37	128,84	52%
3.	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disampaikan tepat waktu	-	-	-	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu
4.	Persentase layanan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional yang terpenuhi	-	-	-	90%	92%	95%	95%	225	81,82%	98,51%	95%	98,61%	124	90,91	107,08	100,00	103,80	55%
5.	Jumlah layanan penggunaan ruang rapat/ aula pertemuan	-	-	-	75 kali	82 kali	85 kali	90 kali	100	233 Kali	164 kali	158 kali	46 Kali	82	310,67	3,11	185,88	51,11	82,00
6.	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kunjungan/ inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah ke kabupaten/ kota	-	-	-	24 kali	24 kali	28 kali	24 kali	-	21 kali	42 kali	76 kali	58 kali	-	87,5	87,50	271,43	241,67	-
7.	Jumlah fasilitasi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	-	-	28 kali	30 kali	30 kali	30 kali	73	24 kali	30 kali	45 kali	88 kali	37	85,71	100,00	150,00	293,33	51%
8.	Persentase pelayanan jamuan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam rangka audiensi/ dialog dengan tokoh masyarakat dan penerimaan kunjungan tamu pemda yang terfasilitasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	50	71,00%	93%	99%	93%	90	93,00	93,00	99,00	93,00	180%
9.	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun sesuai dengan aturan yang berlaku	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	100	100	100	100	33%

Selain itu berdasarkan data target dan realisasi pencapaian kinerja selama periode yang lalu 2016-2021 secara umum telah tercapai seluruhnya bahkan terdapat beberapa indikator kinerja yang over target seperti pada indikator kegiatan di bawah ini:

1. Persentase surat yang ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang ditentukan pada Tahun 2017 (**118,38%**) dan Tahun 2018 (**109,03%**) melebihi target yakni masing-masing dari Tahun 2017 sampai dengan 2020 berkisar 85% hingga 95%;
2. Persentase Surat Perintah Membayar (SPM) yang dapat diselesaikan dalam 3 hari kerja dari Tahun 2017 (**119,8%**), Tahun 2018 (**164,6%**), Tahun 2019 (**140%**), dan Tahun 2020 (**122,4%**) melebihi target yakni masing-masing dari Tahun 2017 sampai dengan 2020 berkisar 87% hingga 95%;
3. Jumlah layanan penggunaan ruang rapat/ aula pertemuan dari Tahun 2017 (**233 Kali**), Tahun 2018 (**164 kali**), Tahun 2019 (**158 kali**) melebihi target yakni masing-masing dari Tahun 2017 sampai dengan 2020 berkisar 75 kali pelayanan hingga 90 kali pelayanan, hanya saja di Tahun 2020 berkurang realisasinya yakni hanya sebesar 46 kali saja, hal ini dikarenakan pada Tahun 2020 ini merupakan awal mula Pandemi Covid 19.

Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah mencoba untuk melakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD menggunakan pelaksanaan Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode sebelumnya 2016-2021, agar dapat mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (tersaji dalam tabel 2.7). Secara umum pendanaan bagi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah masih kurang baik, hal ini dapat terlihat dari rata-rata rasio perbandingan target dan realisasi pendanaan yang masih dibawah 100% untuk setiap tahunnya, hal ini dikarenakan fluktuatifnya target sasaran kegiatan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung (BL)	60.165.552.000,00	118.204.304.735,00	103.719.538.404,14	62.573.498.099,75	76.214.331.310,00	54.574.571.944,00	103.801.671.343,00	92.588.651.629,00	52.929.801.864,95	10.563.393.556,00	90,71	87,82	89,27	84,59	13,86	420.877.224.548,89	314.458.090.336,95
Belanja Tidak langsung (BTL)	60.838.377.926,00	59.210.137.267,00	56.240.053.795,00	51.968.989.402,00	48.546.958.366,00	45.179.750.979,00	47.186.869.364,00	44.298.226.034,00	47.206.967.079,00	20.783.104.643,00	74,26	79,69	78,77	90,84	42,81	276.804.516.756,00	204.654.918.099,00
Jumlah	121.003.929.926,00	177.414.442.002,00	159.959.592.199,14	114.542.487.501,75	124.761.289.676,00	99.754.322.923,00	150.988.540.707,00	136.886.877.663,00	100.136.768.943,95	31.346.498.199,00	82,48	83,75	84,02	87,71	28,34	697.681.741.304,89	519.113.008.435,95
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	260.000.000,00	275.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	125.000.000,00	166.000.000,00	183.555.555,00	90.500.000,00	191.500.000,00	37.000.000,00	63,85	66,75	32,32	68,39	29,60	1.220.000.000,00	668.555.555,00

Berdasarkan Tabel 2.7 di atas dapat dijelaskan bahwa rasio antara realisasi dan keuangan pada akhir tahun RPJMD yakni Tahun 2019 dan 2020 belum mencapai 100% dikarenakan pada tahun tersebut seluruh SKPD, termasuk Biro Umum mengalami rasionalisasi anggaran karena dialihkan untuk penanganan Covid-19, kemudian pada Tahun 2021 realisasi masih belum selesai karena pada penyusunan Rancangan Renstra ini data yang diambil merupakan realisasi pada Akhir Triwulan II.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Umum

Tantangan dan peluang merupakan faktor eksternal yang akan mempengaruhi organisasi dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapainya. Biro Umum sebagai unit pendukung pelayanan pimpinan dan kesekretariatan kedepannya akan menghadapi tantangan yang cukup berat dalam memberikan dukungan terhadap kesuksesan tugas-tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimana intensitas kunjungan kerja Pimpinan semakin tinggi dan intensitas kunjungan tamu yang juga semakin tinggi dan sulit diprediksi. Berkaitan dengan pelayanan fungsional Biro Umum, tantangan yang seringkali dihadapi dari aspek pelayanan publik yang semakin menuntut standar pelayanan prima diantaranya yakni masih tumpang tindihnya permintaan penggunaan atau peminjaman ruang pertemuan/aula, didukung dengan belum adanya standar minimal dari pelayanan baik itu pelayanan tempat, fasilitasi pelayanan maupun fasilitasi kendaraan, serta belum adanya sistem yang terintegrasi dalam manajemen pengelolaan sarana dan prasarana kantor. Sehingga faktor kualitas SDM dan Sarana dan Prasarana menjadi dua aspek yang harus diperhatikan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka perlu strategi operasional yang dapat diimplementasikan dan diwujudkan melalui kebijaksanaan, rangkaian program, kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan yang menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas

sebagai suatu sistem operasional Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu kedepannya Biro Umum diharapkan dapat meningkatkan Kinerjanya dengan mengoptimalkan peluang-peluang yang ada, serta sumber daya manusia dan fasilitas-fasilitas yang sudah dimiliki agar dapat bermanfaat dalam melaksanakan Tupoksi Biro Umum.

Peluang yang ada kedepannya cukup memberikan kesempatan bagi organisasi untuk terus berkembang. Pemanfaatan teknologi maju dalam pelayanan publik adalah salah satu peluang yang mesti direspon oleh Biro Umum, karena perubahan zaman yang begitu masif ini menuntut organisasi untuk bergerak cepat, mudah dan transparan. Selain itu, peluang juga terlihat pada aspek pengembangan manajemen SDM. Arah pembangunan Kalimantan Tengah pada periode RPJMD berikutnya menuntut peningkatan daya saing daerah, maka organisasi telah mesti mempersiapkan diri dengan meningkatkan kapasitas SDM yang dimilikinya sejak mulai dari sekarang.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Umum

Identifikasi permasalahan yang dihadapi Biro Umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Aspek Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik menjadi sorotan seiring tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang terbaik dari pemerintah. Biro Umum harus segera merespon tuntutan tersebut dengan melakukan penyempurnaan terhadap standar minimal pelayanan publik dan pimpinan yang ada, berikut Standar Operasional Pelayanan (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas pelayanannya. Kondisi yang ada saat ini menunjukkan masih belum terpenuhinya harapan publik akan kualitas pelayanan publik, hal ini dilihat dari Standar Pelayanan yang masih perlu direvisi dan diimplementasikan, aparatur pelayanan juga belum memberikan pelayanan seperti yang diharapkan, serta fasilitas pelayanan yang masih kurang lengkap. Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya kualitas pelayanan adalah masih lemahnya kontrol terhadap implementasi standar pelayanan, dan belum optimalnya pengelolaan data dan informasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga belum terlihat konsistensi dalam memberikan pelayanan yang ramah cepat dan akuntabel.

3.1.2 Aspek Sumber Daya Manusia

Apabila dilihat dari kualitas SDM yang tersedia, maka tidak sebanding dengan beban tugas Biro Umum yang cukup besar dan luasnya ruang lingkup pekerjaan. Dilihat dari jumlah SDM yang dimiliki cukup banyak, namun pada beberapa kompetensi yang sangat dibutuhkan justru terjadi kekurangan. Luasnya lingkup pekerjaan Biro Umum menuntut tersedianya tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan atau skill khusus seperti pramusaji, pramu kebersihan teknis, pramu wisma, pramu pimpinan dan lain-lain. Rendahnya kualitas SDM sangat dipengaruhi oleh budaya kerja yang lamban, tidak ramah dan tidak transparan, hal ini mengakibatkan belum optimalnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan maupun melaksanakan tugas yang diembannya. Sementara itu, terbatasnya kewenangan Biro Umum dalam hal rekrutmen dan pengembangan PNS menjadi hambatan tersendiri dalam menghadapi keterbatasan ini.

3.1.3 Aspek Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Biro Umum terbatas dari segi jumlah dan kualitas. Seperti ketersediaan kendaraan dinas/operasional, jabatan dan kendaraan lapangan yang masih kurang. Fasilitas ruang rapat dan aula/gedung pertemuan yang juga terbatas dan masih belum memenuhi kualitas standar pelayanan yang diharapkan. Permasalahan juga muncul dari segi pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut karena terbatasnya tenaga teknis yang memadai. Selain itu organisasi belum dapat menerapkan manajemen mutu dan manajemen logistik yang baik serta keterbatasan kapasitas organisasi dalam pembangunan fisik.

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan bidang urusan pelayanan umum berkewajiban mendukung perwujudan visi, misi, agenda dan tujuan daerah yang telah dirumuskan. Berikut ini merupakan **Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah terpilih periode 2021-2026** :

“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan, berikut penjabaran Visi Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah periode Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Penjabaran Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2021-2026

No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
1	Bermartabat	Kalimantan Tengah yang makin unggul, berdaya saing tinggi, dan memiliki reputasi cemerlang
2	Elok	Kalimantan Tengah yang makin indah dan menawan secara tata ruang kewilayahan serta berorientasi Green Kalteng (Kalteng Hijau), disertai perilaku masyarakat yang ramah.
3	Religius	Kalimantan Tengah yang makin taat dalam melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan individu maupun publik demi Kalteng yang berkarakter.

No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
4	Kuat	Kalimantan Tengah yang kuat secara ekonomi, sejahtera lahir dan batin. Kalteng sehat, mandiri, Tangguh, dan maju dalam berbagai sector.
5	Amanah	Kalimantan Tengah yang berintegritas, jujur, dan penuh dedikasi. Komitmen dan konsisten dalam menjaga dan melindungi seluruh warga Kalteng.
6	Harmonis	Hidup rukun antar sesama warga dengan latar belakang kemajemukan secara agama, etnik, dan antar golongan dalam suasana saling menghormati dan menghargai demi keberkahan bersama.

Sedangkan untuk penjabaran strategi pembangunan berdasarkan misi dari visi pembangunan Daerah Kalimantan Tengah periode tahun 2021-2026 yaitu:

Gambar 3.1
Penjabaran Misi RPJMD 2021-2026



Sumber: Ranwal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 (Bab VI)

Berdasarkan visi dan misi Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah periode 2021-2026, Biro Umum sendiri termasuk ke dalam pencapaian Misi Pembangunan ke-3 yakni **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi”**, dengan Tujuan *“Mewujudkan Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif”* dan sasarannya yakni *“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif dan Responsif”* yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai tujuan, sasaran, program berikut dengan indikatornya pada Bab selanjutnya pada Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Peran Biro Umum sebagai supporting unit Pelayanan Pimpinan dan Publik ikut mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menyediakan ruang pelayanan seperti pelayanan surat masuk satu pintu, pelayanan aula/gedung dan ruang rapat/pertemuan, pelayanan kendaraan bagi tamu pemda, pusat maupun instansi lainnya, serta pelayanan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) pada bagian Keuangan Setda.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Biro Umum memiliki sumber daya aset yang dapat dikembangkan jumlah dan kualitasnya, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi pada pelayanan surat masuk. Sedangkan Hambatan yang dihadapi oleh Biro Umum dalam pengembangan pelayanan ini datang dari aspek SDM yang masih kurang dari segi kualitasnya. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat penerapan budaya kerja seperti belum terlihatnya pelayanan yang profesional dari aparaturnya serta belum maksimalnya rancangan dan implementasi prosedur pelayanan tamu.

Dari uraian di atas, maka peta strategi dan arah kebijakan Biro Umum ke depannya dapat difokuskan pada 1. *Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik*, 2. *Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pelayanan Pimpinan dan Publik*, serta 3. *Peningkatan Inovasi dalam Keterbukaan Informasi melalui Sistem yang Terintegrasi*. Sedangkan

kebijakan-kebijakan administrasi umum lainnya merupakan upaya Biro Umum sebagai lini pendukung kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.3 Telaahan Renstra

Dari beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi pada Biro Umum dan dari visi, misi agenda dan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka disusunlah rencana strategis pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk lima tahun kedepan, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang tertuang dalam bentuk program dan kegiatan.

Bercermin pada kekurangan yang terdapat pada Biro Umum, maka dilakukan pembenahan pelayanan dengan cara mengarahkan peningkatan program/ kegiatan pada peningkatan pemberian bimbingan teknis bagi aparatur untuk meningkatkan pemahaman dan kinerja pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan sehingga meningkatkan citra pelayanan pemerintah dimata masyarakat luas.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Untuk Biro Umum dalam hal RTRWP dan Kajian Lingkungan Hidup tidak ada hal yang dapat di telaah.

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis

Peran perencanaan strategis sangatlah penting dalam membantu organisasi untuk menetapkan isu strategis yang perlu dan relevan untuk diperjuangkan. Kegagalan organisasi dalam menetapkan isu strategis akan berdampak pada penyelenggaraan tugas dan fungsi secara rutin (*bussiness as usual*) dan reaktif. (John M. Bryson,2000:xviii).

Mencermati hal ini, serta sebagai upaya untuk membenahi pelaksanaan tugas agar terhindar dari rutinitas dan reaktif, Biro Umum mencoba merumuskan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik menjadi fokus perhatian pemerintah daerah saat ini karena besarnya tuntutan masyarakat. Biro Umum sebagai lini pendukung (*supporting staff*) Setda menjadi yang terdepan dalam penguatan fungsi pelayanan publik ini karena vitalnya tupoksi yang dimiliki dalam memfasilitasi pimpinan, tamu pemda dan masyarakat. Secara menyeluruh, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selalu berupaya untuk melakukan penguatan dan optimalisasi “peran” masing-masing SKPD. Hal ini sejalan dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang baik dan memuaskan dari birokrasi.
2. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan pada Tahun 2024 atau periode RPJMD ke III yang diarahkan pada “*Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Amanah*” (Bab VI Ranwal RPJMD, 2021), maka Biro Umum sebagai yang terdepan dalam melayani pimpinan dan tamu-tamu pemda, perlu menyikapinya dengan penguatan kapasitas organisasi, agar dapat memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai serta SDM pelayanan yang handal.
3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan media masa dirasa sangat diperlukan demi mengoptimalkan kinerja pelayanan publik dan pelayanan pimpinan. Hal ini disebabkan era modernisasi yang menuntut setiap SKPD untuk lebih mempermudah akses birokrasi melalui inovasi pelayanan publik berbasis teknologi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
BIRO UMUM TAHUN 2021-2026

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran/ implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada analisis strategis internal dan eksternal dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing-masing indikator dari program dan kegiatan).

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Kebijakan tersebut dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan dan sasaran Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pencapaian Visi Misi Tahun 2021-2026 termasuk ke dalam **Misi ke 3 (Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi)** sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	80%	83%	86%	89%	91%
			Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	2%	2.1%	2.2%	2.3%	2.5%
		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif	Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	150	150	155	155	160
			Jumlah Pelayanan Jamuan/Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda	100	125	135	150	160
			Jumlah surat/tata naskah dinas yg ditindaklanjuti oleh pimpinan	215	230	230	240	250
			Jumlah Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas/Opreasional	80	85	85	90	90
			Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/Aula	150	165	165	170	170

Tujuan dari Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah *“Mewujudkan Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif”*. Adapun yang menjadi indikator dari tujuan tersebut yakni *Presentase Fasilitasi Pelayanan Publik dan Pimpinan*. Sedangkan yang menjadi sasaran Biro Umum adalah *“1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pimpinan yang inovatif dan responsif”*. Adapun yang menjadi indikator sasaran tersebut yakni sebagai berikut:

1. Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik;
2. Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana;
3. Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH);
4. Jumlah Pelayanan Jamuan/Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda;
5. Jumlah surat/tata naskah dinas yg ditindaklanjuti oleh pimpinan;
6. Jumlah Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas/Operasional;
7. Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/Aula.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan Visi, Misi, tujuan, dan Sasaran Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	: “KALIMANTAN TENGAH MAKIN BERKAH (Bermatabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”		
Misi	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Revitalisasi Sarana dan Prasarana guna meningkatkan daya dukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Peraturan dan Standarisasi sarana prasarana kantor 2. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai dan mendukung kinerja pelayanan 3. Menjaga kualitas kondisi sarana dan prasarana yang baik 4. Peningkatan Inovasi dalam keterbukaan informasi publik melalui sistem yang terintegrasi dalam manajemen pengelolaan sarana dan prasarana kantor

Visi	: “KALIMANTAN TENGAH MAKIN BERKAH (Bermatabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”		
Misi	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pimpinan yang Inovatif dan Responsif	Meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas untuk kepentingan Publik dan Pimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kompetensi SDM ASN yang profesional dan Peningkatan kualitas pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah 2. Mengoptimalkan Penggunaan Sistem Informasi berbasis Teknologi Informasi (TI) dalam Pelayanan Publik 3. Pelayanan Publik dan Pimpinan yang berorientasi pelayanan prima

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka strategi yang akan diterapkan Biro Umum berdasarkan tabel di atas antara lain:

1. Revitalisasi Sarana dan Prasarana guna meningkatkan daya dukung; dan
2. Meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas untuk kepentingan Publik dan Pimpinan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan SKPD serta misi dan visi pembangunan Kalimantan Tengah tahun 2021-2026. Berikut ini merupakan arah kebijakan Biro Umum Tahun 2021-2026:

1. Penyusunan peraturan dan standarisasi sarana prasarana kantor;
2. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai dan mendukung kinerja pelayanan;

3. Menjaga kualitas kondisi sarana dan prasarana yang baik;
4. Peningkatan Inovasi dalam keterbukaan informasi publik melalui sistem yang terintegrasi dalam manajemen pengelolaan sarana dan prasarana kantor;
5. Peningkatan Kompetensi SDM ASN yang profesional dan Peningkatan kualitas pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah;
6. Mengoptimalkan Penggunaan Sistem Informasi berbasis Teknologi Informasi (TI) dalam Pelayanan Publik;
7. Pelayanan Publik dan Pimpinan yang berorientasi pelayanan prima.

Selaras dengan strategi dan kebijakan di atas, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah menjabarkannya ke dalam program dan kegiatan sebagaimana Renstra Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2020, Biro Umum melakukan tahapan untuk merumuskan dan melakukan penyusunan program, kegiatan, maupun sub kegiatan perangkat daerah beserta pendanaanya. Untuk dapat mengimplementasikan visi-misi, yang dioperasionalkan melalui strategi dan kebijakan, maka dalam lima tahun ke depan program dan kegiatan yang direncanakan untuk dapat mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi 1 program, 10 kegiatan, dan 49 sub kegiatan. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja Program, serta Kerangka Pendanaan akan disajikan lebih rincin pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		UNSUBSIDIARIS														
		UNSUBSIDIARIS														
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH														
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Tahun)			124.761.289.676		143.261.628.250		126.263.430.875		142.355.386.131		140.099.743.494		676.741.478.427
	4.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renja, Renja Perubahan, Renstra Biro Umum (dokumen)	4 dokumen	3 dokumen	25.000.000	3 dokumen	25.000.000	3 dokumen	30.000.000	3 dokumen	30.000.000	4 dokumen	31.250.000	20 dokumen	141.250.000
	4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	31.250.000	6 dokumen	141.250.000
	4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4 dokumen	4 dokumen	31.250.000	4 dokumen	31.250.000	4 dokumen	35.000.000	4 dokumen	35.000.000	4 dokumen	37.500.000	24 dokumen	170.000.000
	4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	31.250.000	6 dokumen	141.250.000

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4 dokumen	4 dokumen	31.250.000	4 dokumen	31.250.000	4 dokumen	35.000.000	4 dokumen	35.000.000	4 dokumen	37.500.000	24 dokumen	170.000.000
	4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4 laporan	4 laporan	25.000.000	4 laporan	25.000.000	4 laporan	30.000.000	4 laporan	30.000.000	4 laporan	31.250.000	24 laporan	141.250.000
	4.01.01.1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3 laporan	3 laporan	25.000.000	3 laporan	25.000.000	3 laporan	30.000.000	3 laporan	30.000.000	3 laporan	31.250.000	18 laporan	141.250.000
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
	4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan Gubernur, Wakil Gubernur, PNS Lingkup Setda (tahun)	1 Tahun	1 Tahun	52.976.337.500	1 Tahun	58.273.971.250	1 Tahun	64.101.368.375	1 Tahun	73.716.573.631	1 Tahun	81.088.230.994	6 tahun	330.156.481.751
	4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Telaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Tahun	1 Tahun	127.000.000	1 Tahun	127.000.000	1 Tahun	130.000.000	1 Tahun	130.000.000	1 Tahun	130.000.000	6 tahun	644.000.000
	4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan semesteran Biro Umum dan Setda Prov. Kalteng (Laporan)	2 laporan	2 laporan	70.000.000	2 laporan	70.000.000	2 laporan	80.000.000	2 laporan	80.000.000	2 laporan	80.000.000	12 laporan	380.000.000
	4.01.01.1.02.07	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan Akhir Tahun Biro Umum dan Setda (Laporan)	1 laporan	1 laporan	65.000.000	1 laporan	65.000.000	1 laporan	71.500.000	1 laporan	71.500.000	1 laporan	71.500.000	6 laporan	344.500.000
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	17.250.000	12 dokumen	67.250.000
	4.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terjaminnya kepemilikan Aset berupa Rujab Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Gedung Kantor Gubernur serta kendaraan dinas operasional (Laporan)	1 laporan	1 laporan	500.000.000	1 laporan	500.000.000	1 laporan	520.000.000	1 laporan	520.000.000	1 laporan	525.000.000	6 laporan	2.565.000.000
	4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah serta penyusunan KIB KIR dan Buku Inventaris Lingkup Setda (Laporan)	2 laporan	2 laporan	250.000.000	2 laporan	250.000.000	2 laporan	300.000.000	2 laporan	300.000.000	2 laporan	307.500.000	12 laporan	1.407.500.000
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
	4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN Sekretariat Daerah (stell)	-	1.170 stell	900.000.000	Stell	-	2.000 stell	1.300.000.000	Stell	-	2.000 stell	1.450.000.000	5.170 stell	3.650.000.000
	4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terfasilitasinya Peningkatan kompetensi PNS dan Tenaga Kontrak melalui mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek Dan Kursus Singkat (orang)	10 orang	20 orang	232.000.000	20 orang	232.000.000	35 orang	250.000.000	35 orang	250.000.000	35 orang	265.000.000	155 orang	1.229.000.000
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik, lampu pijar dan battery kering lingkup Setda Prov.Kalteng (tahun)	1 Tahun	1 Tahun	784.407.000	1 Tahun	784.407.000	1 Tahun	800.000.000	1 Tahun	800.000.000	1 Tahun	825.000.000	6 tahun	3.993.814.000
	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Lingkup Biro Umum dan Pimpinan (Sekda, Asisten, SAG) (tahun)	1 Tahun	1 Tahun	450.000.000	1 Tahun	450.000.000	1 Tahun	550.000.000	1 Tahun	550.000.000	1 Tahun	575.000.000	6 tahun	2.575.000.000
	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan, blanko-blanko administrasi perkantoran dan penggandaan keperluan Pimpinan dan Biro Umum Setda Prov.Kalteng (tahun)	1 Tahun	1 Tahun	420.000.000	1 Tahun	420.000.000	1 Tahun	450.000.000	1 Tahun	475.000.000	1 Tahun	475.000.000	6 tahun	2.240.000.000
	4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya pelayanan dan jamuan (makanan dan minuman Tamu) kunjungan tamu-tamu Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri serta makan minum rapat SKPD (tahun)	1 Tahun	1 Tahun	3.000.000.000	1 Tahun	3.000.000.000	1 Tahun	3.500.000.000	1 Tahun	3.500.000.000	1 Tahun	3.575.000.000	6 tahun	16.575.000.000
	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah ASN Lingkup Biro Umum dan Pimpinan (Sekda, Asisten dan SAG) (tahun)	1 Tahun	1 Tahun	3.500.000.000	1 Tahun	3.500.000.000	1 Tahun	3.575.000.000	1 Tahun	3.575.000.000	1 Tahun	3.600.000.000	6 tahun	17.750.000.000

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	4.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terkelolanya Arsip Biro umum (Laporan)	2 laporan	2 laporan	100.000.000	2 laporan	100.000.000	2 laporan	150.000.000	2 laporan	150.000.000	2 laporan	165.000.000	12 laporan	665.000.000	
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														-	
	4.01.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan untuk Pimpinan (unit)	-	2 unit	2.800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	2.800.000.000	
	4.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)	3 unit	7 unit	9.350.000.000	3 unit	2.100.000.000	-	-	3 unit	3.000.000.000	-	-	16 unit	14.450.000.000	
	4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel ruang kerja (Furniture) KDH WKDH, ASN Lingkup Biro Umum dan Pimpinan (Mebelair utk AEH)(Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	1.738.000.000	1 Tahun	1.738.000.000	1 Tahun	1.750.000.000	1 Tahun	1.750.000.000	1 Tahun	1.775.000.000	6 tahun	8.751.000.000	
	4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya utk Kantor dan Rujab Pimpinan (pengadaan LCD Proyektor dan Sound System utk AEH, videotron dan Sound System untuk AJT lt.1 dan peralatan mesin lainnya) (paket)	-	1 Tahun	2.250.000.000	1 Tahun	1.000.000.000	1 Tahun	750.000.000	1 Tahun	950.000.000	1 Tahun	500.000.000	5 tahun	5.450.000.000	

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangunya Gedung atau Bangunan Lainnya (Gedung Genset, Food Court dan ATM Center, serta penataan Ruang Terbuka Hijau di Area Kantor Gubernur) di Lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Gedung/bangunan/area)	-	-	-	1 Gedung	15.100.000.000	1 Bangunan	4.100.000.000	1 Area	10.000.000.000	-	-	3 gedung/bangunan/area	29.200.000.000
	4.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Penangkal Petir Gedung/bangunan, Public Information Service, Alat Pendeteksi Kebakaran) (Fasilitas/Unit)	-	1 Fasilitas	400.000.000	1 Fasilitas	2.000.000.000	1 Fasilitas	2.800.000.000	-	-	-	-	3 fasilitas/unit	5.200.000.000
	4.01.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan yang memadai dan mendukung kinerja aparatur Lingkup Setda dan Rujab Pimpinan (Karpas untuk AEH, Gorden utk AEH) (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	500.000.000	1 Tahun	2.750.000.000	1 Tahun	750.000.000	1 Tahun	950.000.000	1 Tahun	1.100.000.000	6 tahun	6.050.000.000
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman surat/paket/barang (Surat)	500 surat	1.000 surat	86.250.000	1.000 surat	86.250.000	1.500 surat	90.562.500	1.500 surat	90.562.500	1.500 surat	91.000.000	7.000 surat	444.625.000

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terjaminnya pasokan listrik, air bersih, telepon dan internet di lingkungan Rujab dan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (tahun)	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000.000	1 Tahun	5.000.000.000	1 Tahun	5.100.000.000	1 Tahun	5.100.000.000	1 Tahun	5.150.000.000	6 tahun	25.350.000.000
	4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor (tahun)	1 Tahun	1 Tahun	905.000.000	1 Tahun	905.000.000	1 Tahun	910.000.000	1 Tahun	910.000.000	1 Tahun	915.000.000	6 tahun	4.545.000.000
	4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya pelayanan umum kantor (Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak, Administrasi Keuangan, serta Jasa dan Alat Kebersihan Kantor) (tahun)	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000.000	1 Tahun	10.100.000.000	1 Tahun	10.105.000.000	1 Tahun	10.110.000.000	1 Tahun	10.115.000.000	6 tahun	50.430.000.000
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														-
	4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terjaminnya pasokan BBM/ pelumas serta pemeliharaan mobil jabatan KDH dan WKDH (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	1.000.000.000	1 Tahun	1.000.000.000	1 Tahun	1.050.000.000	1 Tahun	1.100.000.000	1 Tahun	1.100.000.000	6 tahun	5.250.000.000
	4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terjaminnya pelayanan operasional kendaraan dinas meliputi pasokan BBM/ pelumas dan pemeliharaan serta pembayaran STNK (tahunan dan 5 tahunan) dan KIR kendaraan dinas/operasional (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	2.500.000.000	1 Tahun	2.500.000.000	1 Tahun	2.550.000.000	1 Tahun	2.550.000.000	1 Tahun	2.600.000.000	6 tahun	12.700.000.000

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel di lingkungan Sekretariat Daerah (Pemeliharaan untuk Kursi AEH) (tahun)	1 Tahun	1 Tahun	420.000.000	1 Tahun	500.000.000	1 Tahun	420.000.000	1 Tahun	450.000.000	1 Tahun	450.000.000	6 tahun	2.240.000.000
	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya (AC, mesin potong rumput dan peraltan mesin lainnya) (tahun)	1 Tahun	1 Tahun	1.000.000.000	1 Tahun	1.000.000.000	1 Tahun	1.100.000.000	1 Tahun	1.100.000.000	1 Tahun	1.200.000.000	6 tahun	5.400.000.000
	4.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terpeliharanya Aset Tak Berwujud (Pemeliharaan Aplikasi Persuratan dan Aplikasi SIPEKA) (tahun)	1 Tahun	1 Tahun	80.000.000	1 Tahun	80.000.000	1 Tahun	80.000.000	1 Tahun	90.000.000	1 Tahun	90.000.000	6 tahun	420.000.000
	4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terehabilitasinya (sedang/berat) gedung kantor, rehab ruang kerja Gubernur, rehab gedung biro kesra/ekonomi, pemeliharaan sanitasi/drainase area kntr gub, penataan areal taman dan Gazebo sayap barat dan timur) di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah dan Lingkup Rumah Jabatan (tahun)	1 Tahun	1 Tahun	12.000.000.000	1 Tahun	16.750.000.000	1 Tahun	6.500.000.000	1 Tahun	7.000.000.000	1 Tahun	7.500.000.000	6 tahun	49.750.000.000

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Lingkup Rumah Jabatan (Pemeliharaan Hydran lingkup Setda, Pemeliharaan PIS/pubic information service, pemeliharaan alat deteksi kebakaran dan penangkal petir) (tahun)	-	-	-	1 Tahun	1.050.000.000	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	500.000.000	4 tahun	2.000.000.000
	4.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	1.000.000.000	1 Tahun	1.000.000.000	1 Tahun	1.200.000.000	1 Tahun	1.200.000.000	1 Tahun	1.500.000.000	6 tahun	5.900.000.000
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
	4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (tahun)	1 Tahun	1 Tahun	280.000.000	1 Tahun	300.000.000	1 Tahun	345.000.000	1 Tahun	396.750.000	1 Tahun	456.262.500	6 tahun	1.778.012.500
	4.01.01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Pakaian Dinas Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Stell)	10 Stell	10 Stell	199.795.176	16 Stell	200.000.000	16 Stell	200.000.000	20 Stell	210.000.000	20 Stell	210.000.000	92 stell	1.019.795.176

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terfasilitasinya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (tahun)	1 Tahun	1 Tahun	180.000.000	1 Tahun	180.000.000	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	300.000.000	6 tahun	1.060.000.000
	4.01.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (tahun)	1 Tahun	1 Tahun	2.200.000.000	1 Tahun	2.200.000.000	1 Tahun	2.300.000.000	1 Tahun	2.645.000.000	1 Tahun	3.041.750.000		12.386.750.000
	4.01.01.1.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah														-
	4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terjaminnya pelayanan urusan kerumahtanggaan KDH (Gubernur) (tahun)	1 Tahun	1 Tahun	4.230.000.000	1 Tahun	4.441.500.000	1 Tahun	4.200.000.000	1 Tahun	4.300.000.000	1 Tahun	4.400.000.000	6 tahun	21.571.500.000
	4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terjaminnya pelayanan urusan kerumahtanggaan WKDH (Wakil Gubernur) (tahun)	1 Tahun	1 Tahun	2.820.000.000	1 Tahun	2.961.000.000	1 Tahun	3.150.000.000	1 Tahun	3.250.000.000	1 Tahun	3.300.000.000	6 tahun	15.481.000.000
	4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terjaminnya pelayanan urusan kerumahtanggaan Sekretaris Daerah (tahun)	1 Tahun	1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	350.000.000	1 Tahun	400.000.000	1 Tahun	400.000.000	1 Tahun	425.000.000	6 tahun	1.825.000.000
	JUMLAH					124.761.289.676		143.261.628.250		126.263.430.875		142.355.386.131		140.099.743.494	-	676.741.478.427

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 menunjukkan rencana kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai wujud komitmen organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah terpilih. Indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	80%	80%	83%	86%	89%	91%	91 %
2	Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	2%	2%	2,10%	2,20%	2,30%	2,50%	2,5 %
3	Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	146 Kali	150 Kali	150 Kali	155 Kali	155 Kali	160 Kali	916 Kali
4	Jumlah Pelayanan Jamuan/Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda	100 Kali	100 Kali	125 Kali	135 Kali	150 Kali	160 Kali	770 Kali
5	Jumlah surat/tata naskah dinas yg ditindaklanjuti oleh pimpinan	198 Surat	215 Surat	230 Surat	230 Surat	240 Surat	250 Surat	1363 Surat
6	Jumlah Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas/Operasional	80 Kali	80 Kali	85 Kali	85 Kali	90 Kali	90 Kali	510 Kali
7	Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/Aula	150 Kali	150 Kali	165 Kali	165 Kali	170 Kali	170 Kali	970 Kali

BAB VIII


PENUTUP

Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan suatu rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan sampai dengan program dan kegiatan yang merupakan arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD dan juga merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021- 2026.

Harapan lainnya adalah agar semua unsur dalam Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah maupun semua SKPD terkait dapat menjadi tim kerja yang terintegrasi, bersinergi dan sistematis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya namun lebih dari itu diharapkan dapat bergerak secara dinamis menyesuaikan dengan perubahan yang terus terjadi.

Dokumen ini diharapkan dapat dipedomani dan diimplementasikan oleh seluruh Kepala Bagian dalam penyusunan program kerja dan rencana kinerja tahunan oleh masing-masing Bagian di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga pelaksanaan program dan kegiatan serta capaiannya dapat dievaluasi secara terukur. Semoga Renstra ini dapat memberi masukan dan sumbangan yang berarti bagi pencapaian tujuan dan cita-cita luhur yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2021–2026.

KEPALA BIRO,


LISDA ARRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196809011989112005